



LAPORAN KINERJA (LKJ)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)
PROVINSI JAMBI
TAHUN 2017**



Jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi bertekad mengerahkan segenap upaya dan sumber daya untuk melaksanakan amanat pembangunan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Amanat tersebut diamanatkan dalam Renstra 2016-2021 dan dilaksanakan dengan tujuan utama mencapai visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Jambi ***“Terwujudnya Penanaman Modal yang tumbuh dan Berkembang Secara Berkelanjutan Menuju Jambi Tuntas 2021”***.

Kinerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menunjukkan peningkatan dari tahun 2017 sebagaimana yang tercantum dalam Renstra hamper seluruh indikator kinerja menunjukkan kinerja yang optimal bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Berbagai pencapaian pembangunan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu pada tahun 2017 perlu di pertahankan dan beberapa capaian kinerja yang belum mencapai target optimal akan dapat diperbaiki di tahun berikutnya.

Akhir kata, diharapkan Laporan Kinerja membawa manfaat dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi, dan pada gilirannya akan mendorong pelaksanaan kebijakan pembangunan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan demi peningkatan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi.

Jambi, 2018
 KEPALA DINAS,

AMRON ROSYADI, S.Sos. M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP. 19710510 199703 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	iv
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Tujuan	2
D. Gambaran Umum DPMPTSP Provinsi Jambi	3
E. Peran Strategis DPMPTSP Provinsi Jambi	13
F. Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15
G. Sistematika Laporan	18
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
A. RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021	20
B. Renstra DPMPTSP Prov. Jambi 2016-2021	22
C. Penetapan/Perjanjian Kinerja 2017	28
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi	32
B. Realisasi Anggaran	79
BAB IV	PENUTUP
A. Kesimpulan	84
B. Saran	84
Lampiran	Perjanjian Kinerja

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hubungan antara Tujuan dan sasaran dengan Program.....	27
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Prov. Jambi	28
Tabel 2.3	Rincian Penetapan / Perjanjian Kinerja Tahun 2017	29
Tabel 3.1	Kerangka Pengukuran Kinerja	31
Tabel 3.2	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017.....	32
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	35
Tabel 3.4	Rekapitulasi per sector Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan periode Januari s/d Desember 2017	36
Tabel 3.5	Nilai Rata-rata dan indeks kepuasan Masyarakat Tahun 2017.....	37
Tabel 3.6	Nilai Persepsi, nilai interval, nilai interval konversi, mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.....	37
Tabel 3.7	Perkembangan Jumlah perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan per bidang perizinan tahun 2016 s.d 2017	38
Tabel 3.8	Target dan Realisasi Pencapaian Jumlah Perizinan Periode 2016 s/d 2021	40
Tabel 3.9	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2	50
Tabel 3.10	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3	62
Tabel 3.11	Rencana Investasi Provinsi Jambi Kabupaten/Kota Tahun 2017	63
Tabel 3.12	Realisasi Rencana Investasi dan Tenaga Kerja per Bidang Usaha Tahun 2017.....	65
Tabel 3.13	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4	73
Tabel 3.14	Perbandingan Capaian Realisasi dengan Target Periode Renstra (2016 s.d 2021)	75
Tabel 3.15	Realisasi Anggaran per 31 Desember 2017.....	80
Tabel 3.16	Realisasi Anggaran DPMPTSP Provinsi Jambi Tahun 2017 menurut secretariat dan Bidang	81
Tabel 3.17	Realisasi Anggaran DPMPTSP Provinsi Jambi Tahun 2017 per Program	82

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Komposisi SDM DPMPTSP Prov. Jambi Tahun 2017	15
Grafik 1.2	Jumlah Pegawai berdasarkan eselon DPMPTSP Provinsi Jambi Tahun 2017	16
Grafik 1.3	Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan DPMPTSP Provinsi Jambi Tahun 2017	17
Grafik 1.4	Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan DPMPTSP Provinsi Jambi Tahun 2017	17
Grafik 3.2	Pencapaian realisasi kinerja terhadap target Jangka Menengah DPMPTSP Prov. Jambi	41
Grafik 3.3	Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA Tahun 2017 per Triwulan	52
Grafik 3.4	Perbandingan realisasi penumbuhan investasi dengan Target Penumbuhan Investasi Jangka Menengah 2016-2021	53
Grafik 3.5	Perbandingan Nilai realisasi PMDN, PMA dan Target Periode 2016 s.d 2017	54
Grafik 3.6	Perbandingan antara Realisasi Rencana Investasi dengan Target Jangka Menengah (2016-2021)	64
Grafik 3.7	Realisasi Anggaran per triwulan	82

BAB 1

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi, dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi, bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan memberikan persetujuan dan perizinan penanaman modal berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, DPMPTSP Provinsi Jambi dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja (LKj).

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan kinerja (LKj) yang disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban DPMPTSP Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2017 dalam rangka pencapaian visi dan misi, sekaligus sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari stakeholder demi perbaikan kinerja DPMPTSP Provinsi Jambi.

B. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi Tahun 2017 merujuk pada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil dari kinerja tersebut dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Provinsi Jambi dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan pada tahun berikutnya agar dapat disusun lebih focus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

D. Gambaran Umum DPMPTSP Provinsi Jambi

Pembentukan Organisasi DPMPTSP Provinsi Jambi ditetapkan berdasarkan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016) pada Bab II Pembentukan, Tipologi dan Susunan Perangkat Daerah, pasal 2 ayat (1) poin ke 20 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.

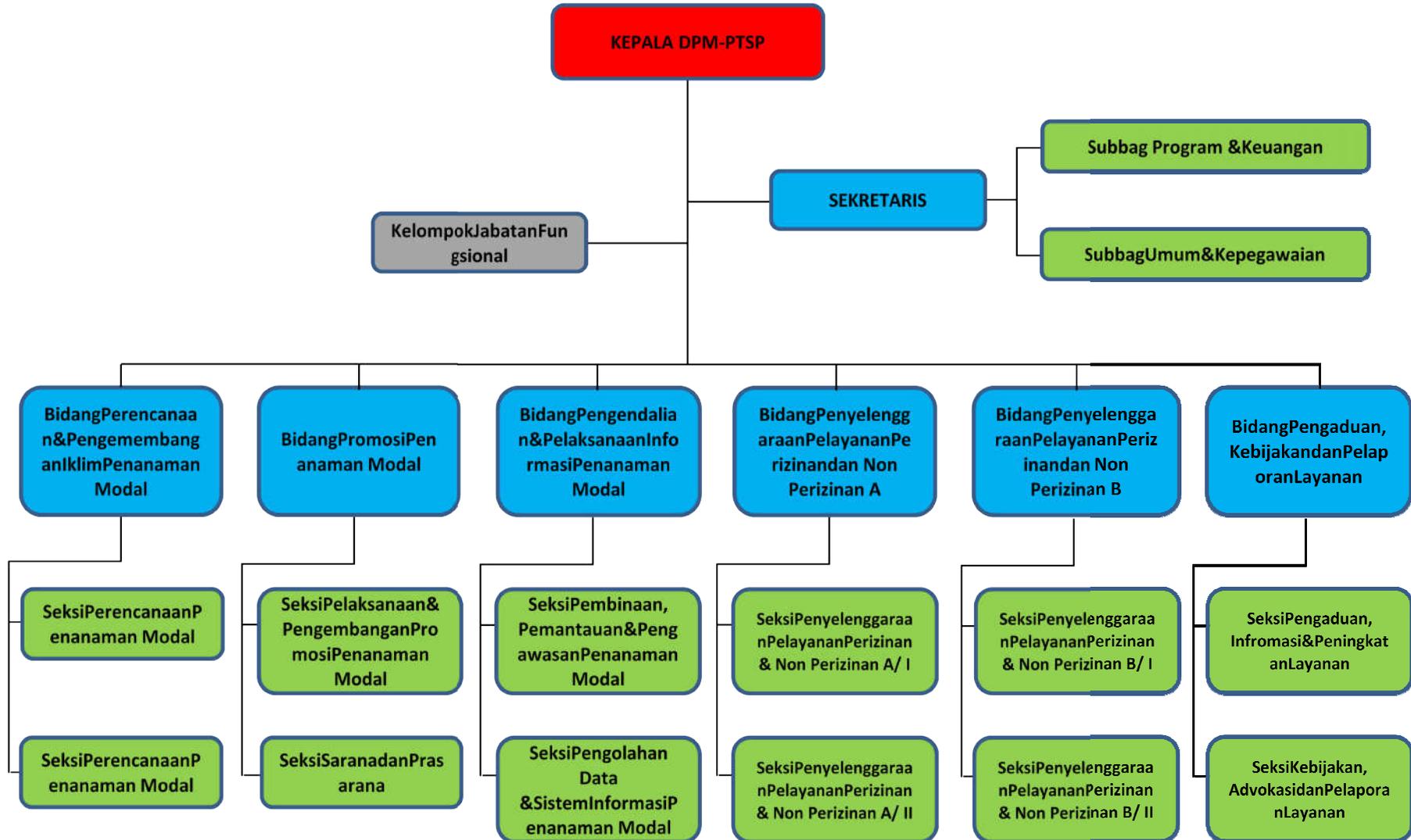
Selanjutnya pada Peraturan Gubernur Jambi Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi pada pasal 2 dijabarkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan memberikan persetujuan dan perizinan penanaman modal berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pemberian dukungan dan penyelenggaraan urusan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada gubernur secara periodik; dan
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2017 DPMPTSP Provinsi Jambi terdiri dari 1 unit eselon II, 7 Unit Eselon III yang terdiri dari 1 Sekretariat,

6 Bidang yang menangani Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun Bagan Organisasinya adalah sebagai berikut :



Secara terperinci uraian tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 54 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|---|
| Tugas Kepala Dinas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas.
Tugas Kepala Dinas yaitu melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perda Nomor 8 Tahun 2016 dan Pergub Nomor 54 Tahun 2016 serta memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional. |
| Sekretariat | <ol style="list-style-type: none"> 2. Sekretaris dengan dua sub Bagian. <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan <p>Tugas sekretariat yaitu membantu dinas dalam rangka mengkoordinasikan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga dilingkungan dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris menyelenggarakan fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi dilingkungan dinas. b. Pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dinas. c. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga dinas. d. Pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan, pelayanan dan bantuan hukum yang berkaitan dengan tugas dinas. e. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan dinas. |

Tugas Bidang
Perencanaan dan
Pegembangan Iklim
Penanaman Modal

3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal terdiri dari dua seksi.

- a. Seksi Perencanaan Penanaman Modal
- b. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal yaitu membantu dinas dalam rangka melakukan kegiatan pengkajian, penyusunan dan pengembangan perencanaan penanaman modal, deregulasi penanaman modal dan pemberdayaan usaha. Bidang Perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. Pengkajian penyusunan dan pengusulan deregulasi kebijakan penanaman modal di Daerah;
- c. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah dengan memberdayakan Badan Usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal di daerah; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas Bidang Promosi
dan Penanaman Modal

4. Bidang Promosi Penanaman Modal terdiri dari dua Seksi.

- a. Seksi Pelaksanaan dan Pengembangan promosi penanaman Modal.
- b. Seksi Sarana dan prasarana promosi penanaman modal.

Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Bidang dalam rangka melaksanakan pengembangan promosi,

pelaksanaan promosi dan penyiapan sarana dan prasarana promosi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal di daerah.
- b. Perencanaan kegiatan promosi dan pengembangan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri.
- c. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal

- 5 Bidang pengendalian pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal terdiri dari dua seksi yaitu :
1. Seksi Pembinaan, Pemantauan dan pengawasan penanaman modal.
 2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal.

Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal Mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta pengolahan data dan informasi penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi

<p>Tugas Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A</p>	<p>penyelesaian permasalahan penanaman modal.</p> <p>c. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan pengolahan data penanaman modal</p> <p>d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.</p> <p>6 Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A terdiri dari dua seksi yaitu :</p> <p>1. Seksi Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A/I.</p> <p>2. Seksi Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A/II.</p> <p>Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A, mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang kebudayaan dan pariwisata, bidang kesehatan, bidang perencanaan dan pembangunan daerah, bidang kehutanan, bidang pekerjaan umum dan perumahan, bidang koperasi dan UKM, bidang perkebunan dan bidang penanaman modal.</p> <p>Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A menyelenggarakan fungsi :</p> <p>a. Pelaksanaan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan A/I.</p> <p>b. Pelaksanaan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non</p>
---	---

		perizinan A/II.
		c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Tugas Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	7	<p>Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B terdiri dari dua seksi yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan perizinan dan non perizinan B/I. 2. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan perizinan dan non perizinan B/II. <p>Bidang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang peternakan, bidang perhubungan dan LLAJ, bidang lingkungan hidup, bidang sosial dan tenaga kerja, bidang pertanian, bidang perindustrian dan perdagangan, bidang kelautan dan perikanan, bidang energi dan sumber daya mineral.</p> <p>Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B menyelenggarakan fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan B/I. b. Pelaksanaan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan B/II. c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Tugas Bidang		Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan

Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Layanan terdiri dari dua seksi :

- a. Seksi pengaduan informasi dan peningkatan layanan.
- b. Seksi Kebijakan, Advokasi dan pelaporan layanan.

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan pelayanan dibidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan yang berkenaan dengan pengaduan dan informasi layanan serta kebijakan, advokasi dan pelaporan layanan perizinan dan non perizinan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan.
- b. Pelaksanaan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, menyederhanakan, mensinkronisasikan, mengevaluasi, memonitoring penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- c. Pelaksanaan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis,

mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif.

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas

8. UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada dinas dapat dibentuk UPTD. UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPTD ditetapkan dalam peraturan gubernur.

Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

9. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang sesuai keahliannya masing-masing.

Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas

E. Peran Strategis DPMPTSP Provinsi Jambi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi mempunyai peran yang strategis yaitu melaksanakan sebahagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu. Dilakukan secara aplikatif antara lain :

- a. Mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing;
- b. Mendorong persebaran penanaman Modal serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai. Investasi yang di kembangkan dalam rangka penyelenggaraan demokrasi ekonomi akan di pergunakan sebesar-besarnya untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat;
- c. Menciptakan iklim investasi yang berdaya saing dan meningkatnya realisasi investasi di seluruh wilayah Jambi.

Untuk melaksanakan peran strategis tersebut, sampai saat ini masih ditemui beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi antara lain :

- a. Belum semua Perizinan yang menjadi kewenangan provinsi ke DPMPTSP Provinsi Jambi oleh Perangkat Daerah Terkait sehingga akan memperpanjang rantai birokrasi dan menambah biaya bagi investor, demikian juga mengenai keberadaan tim teknis yang masih berada di instansi bersangkutan, belum ditempatkan dalam satu wadah sehingga mempersingkat dan mempermudah birokrasi.
- b. Belum dimanfaatkannya secara maksimal (optimal) temu usaha / kemitraan yang difasilitasi oleh DPMPTSP Provinsi Jambi, oleh lembaga/stake holder penanaman modal yang berada di daerah.
- c. Promosi penanaman modal permasalahannya adalah biaya promosi tinggi, masih rendahnya partisipasi daerah untuk mengupdate informasi data peluang usaha/investasi, profil proyek unggulan/prioritas, profil pengusaha daerah yang potensial untuk bermitra dengan UMK dan prosedur penanaman modal.
- d. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal permasalahannya adalah banyak pengusaha PMA/PMDN yang telah memperoleh Surat Perizinan Penanaman Modal (SPPM) dari pemerintah dan sudah berproduksi

komersial dan atau habis masa jadwal penyelesaian proyeknya tapi belum merealisasikan perizinannya dalam bentuk Izin Usaha Tetap/Industri (IUT/IUI).

- e. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal permasalahannya adalah belum tersedianya fasilitas yang memudahkan pelaporan kegiatan penanaman modal; belum tersedianya data dan informasi pelaporan penanaman modal dari seluruh profil proyek penanaman modal bidang-bidang usaha unggulan/prioritas dan potensial secara efektif dan efisien serta akurat dan akuntabel; masih rendahnya jumlah penanam modal yang sadar akan kewajibannya untuk membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) triwulanan, semesteran dan tahunan; Data yang dicatat di DPMPTSP terbatas pada data penanaman modal dalam rangka PMA/PMDN (fasilitasi) dan data-data selain PMA/PMDN masih tersebar di berbagai institusi.
- f. Keterbatasan sumber daya aparatur dalam mengelola dan melakukan pelayanan penanaman modal secara professional.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, maka diperlukan beberapa solusi guna meminimalisir permasalahan yang ada, antara lain :

- a. Lebih aktif mensosialisasikan dan mengkoordinasikan Pergub Nomor 31 Tahun 2017 tentang pendelegasian perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jambi oleh Perangkat Daerah Terkait sehingga rantai birokrasi dan biaya bagi investor akan di perkecil dan tidak memerlukan waktu yang terlalu lama demikian juga dengan tim teknis dari perangkat daerah terkait akan dibentuk wadah melalui satgas percepatan berusaha sesuai dengan Perpres 91 Tahun 2017.
- b. Akan lebih banyak menyelenggarakan kegiatan *machmaking* (kemitraan) antara Pengusaha dan UMKM agar lebih berdaya saing.
- c. Mendorong partisipasi Kabupaten/Kota untuk mengupdate informasi data peluang usaha/investasi, profil proyek unggulan/prioritas, profil pengusaha daerah yang potensial untuk bermitra dengan UMKM dan Prosedur penanaman Modal sebagai bahan untuk dipromosikan di event event nasional dengan meningkatkan efisiensi anggaran promosi investasi Provinsi Jambi.

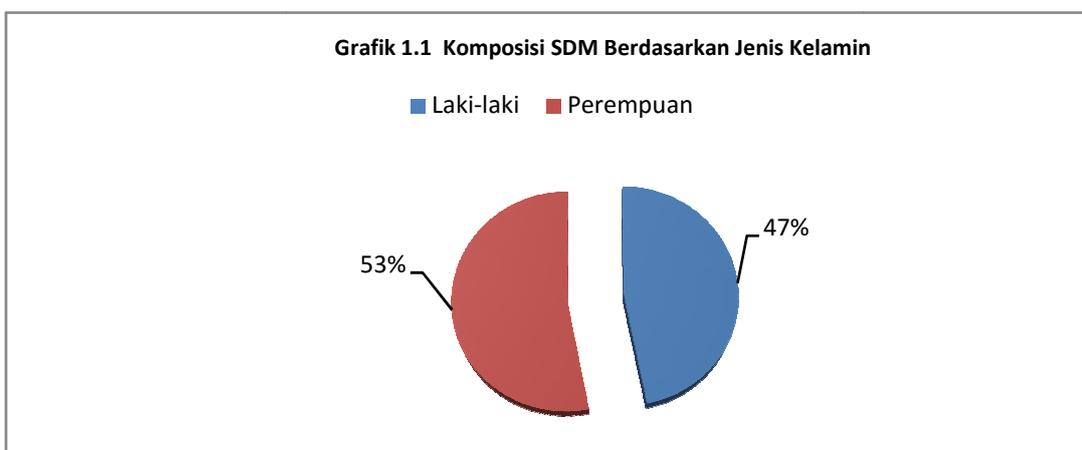
- d. Lebih aktif lagi mengawasi pelaksanaan penanaman modal perusahaan dan lebih banyak menyelenggarakan forum grup discussion tentang hak dan kewajiban perusahaan yang telah diterbitkan Izinnya.
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dengan mengikuti pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis.

F. Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Untuk mengemban tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi per Desember Tahun 2017 didukung Sumber Daya Manusia sebanyak 78 Orang dengan perincian sebagai berikut :

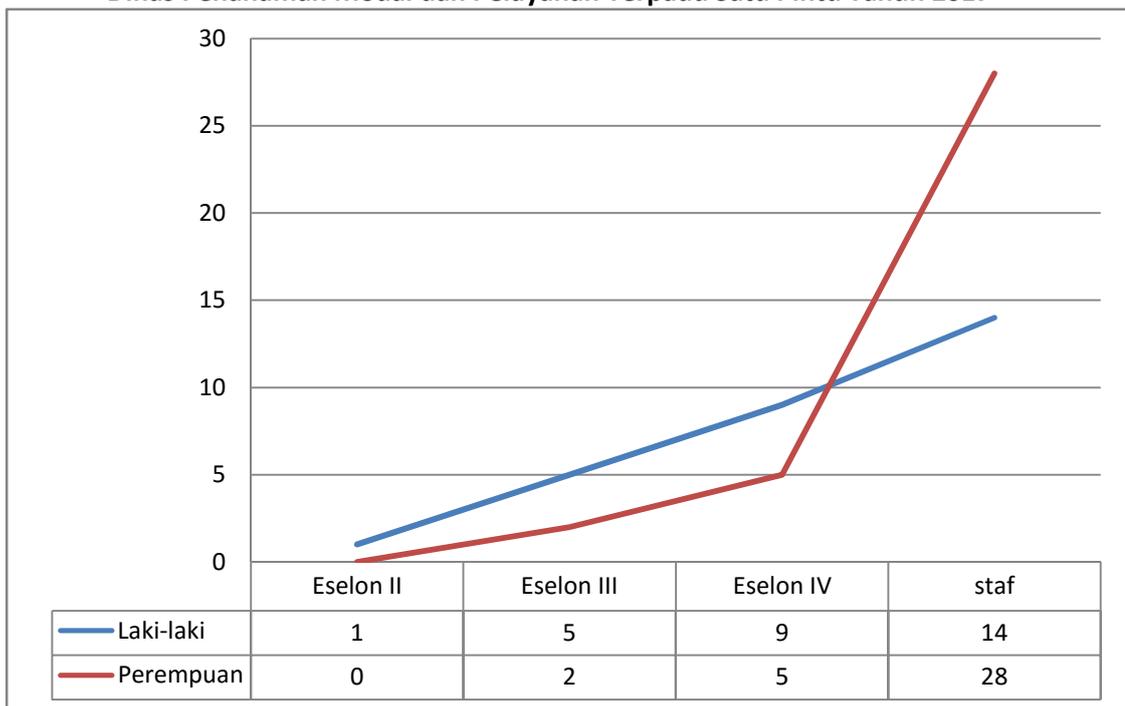
1. PNS sebanyak 64 Orang
2. Pegawai Tidak Tetap sebanyak 14 Orang.

Dalam hal kesetaraan gender peran pegawai perempuan dan laki-laki dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi tidaklah dibeda-bedakan. Namun dari segi jumlah pegawai perempuan lebih banyak dari pada laki-laki. Dengan perimbangan Laki-laki sebanyak 27 Orang (42,18%) dan perempuan sebanyak 37 (57,81%). Ini menunjukkan pengarus utamaan gender brejalan baik di DPMPSTP. Sebagaimana dilihat pada grafik 1 dibawah ini :



Pegawai laki-laki dan perempuan memperoleh perlakuan yang sama serta memiliki kesempatan yang sama dalam berkarir. Hal ini dibuktikan dengan adanya 2 (dua) pegawai perempuan yang menduduki eselon III dan 5 (lima) orang pegawai perempuan menduduki jabatan eselon 4. Untuk lebih jelasnya komposisi pegawai berdasarkan jabatan dapat dilihat pada grafik 1.2 berikut :

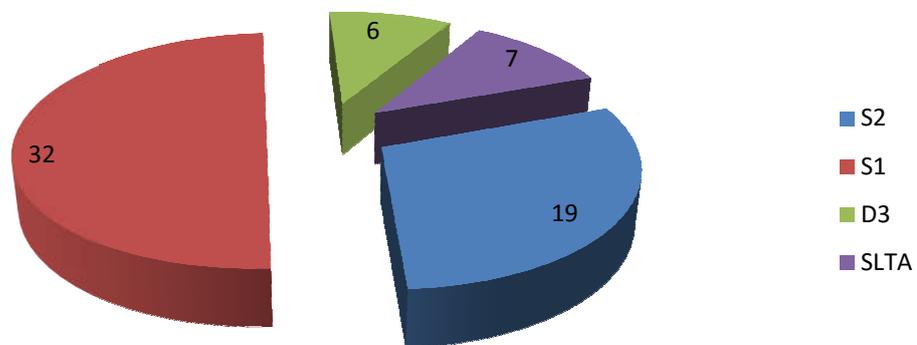
Grafik. 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017



Bila dipilah menurut eselon, dari data diatas menunjukkan bahwa laki-laki mendominasi jabatan eselon. Beberapa upaya perlu didorong untuk membuat pengembangan karir perempuan semakin terbuka termasuk dalam posisi strategis dalam pengambil keputusan. Apalagi karena melihat data diatas menunjukkan bahwa dari segi jenjang pendidikan, semakin tinggi pendidikan kesenjangan gender justru semakin kecil.

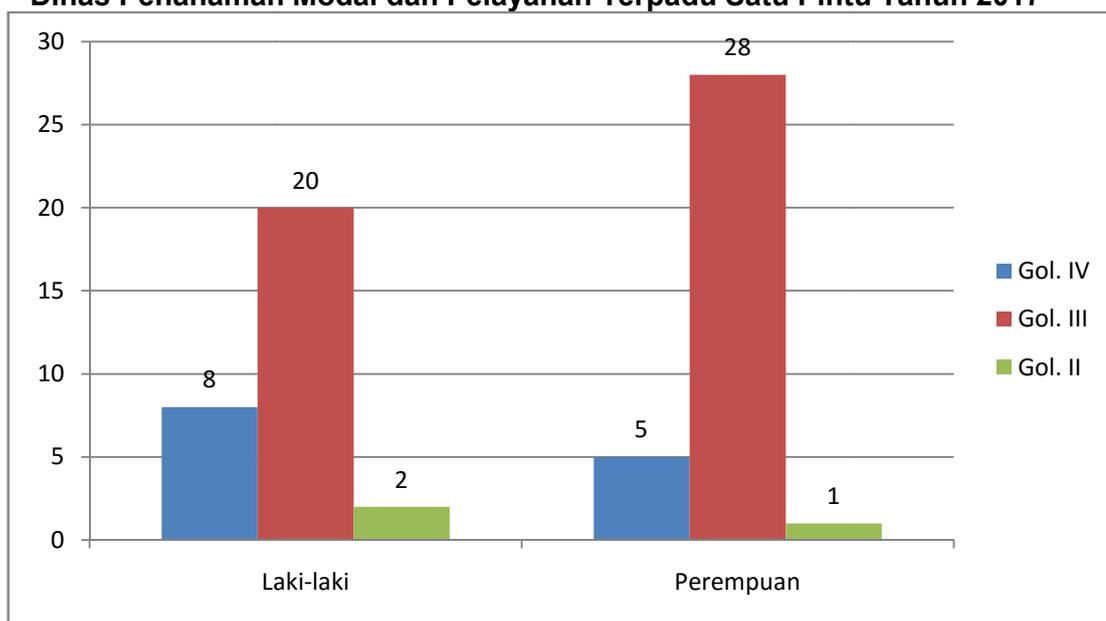
Bila dirunut perjenjang pendidikan, maka jumlah pegawai berpendidikan S1 merupakan yang paling banyak yaitu sebesar 50% atau sebanyak 32 Orang, jenjang pendidikan S2 sebanyak 19 Orang, D3 sebanyak 6 Orang, dan SLTA sebanyak 7 orang. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik1.3
Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2017



Sebagian besar SDM DPMPTSP Provinsi Jambi berdasarkan Golongan 75% adalah golongan III. Untuk pegawai yang bergolongan IV memiliki persentase 20,31%. sedangkan pegawai dengan golongan II memiliki persentase 4,69% dari keseluruhan pegawai. Jumlah pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik.1.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017



G. Sistematika Laporan

Laporan kinerja ini, menyajikan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017. Pencapaian kinerja diukur dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Sistematika penulisan Laporan Kinerja DPMPSTP Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

Executive summary (ikhtisar eksekutif)

Bab I. Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan menekankan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan,

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan-kegagalan pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi Anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan/perjanjian kinerja.

Bab IV Penutup

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1). Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB 2

Perencanaan Kinerja

A. RPJMD Provinsi Jambi 2016 - 2021

RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021 merupakan rencana pembangunan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 – 2025. RPJMD memuat tentang visi, misi dan program prioritas gubernur dan wakil Gubernur periode 2016 – 2021, adapun Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2016 – 2021 adalah :

“ Terwujudnya Provinsi Jambi Yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil, dan Sejahtera 2021 ”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender
3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat
4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan
5. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan
6. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

Berdasarkan rumusan visi dan misi, mengacu serta selaras dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, maka dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan Provinsi Jambi mendefinisikan fokus utama pembangunan pada program prioritas Provinsi Jambi 2016-2021 sebagai berikut:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, dan partisipatif, yang berorientasi pada pelayanan publik, dengan fokus :
 - a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien
 - b. Meningkatkan kualitas pelayanan pada instansi/ lembaga pemerintah daerah yang melayani publik.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender, dengan fokus :
 - a. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
 - b. Peningkatan kualitas pendidikan menengah
 - c. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya
 - d. Peningkatan harmonisasi kehidupan umat beragama
 - e. Peningkatan kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan.
3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama, dan kesadaran hukum masyarakat, dengan fokus :
 - a. Peningkatan stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum
4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan, dengan fokus :
 - a. Peningkatan *total factor productivity* (TFP)
 - b. Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah.
 - c. Peningkatan kemandirian pangan berbasis sumber pangan lokal
 - d. Peningkatan indeks pertanaman pada lahan tanaman pangan.
5. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan fokus :
 - a. Akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian
 - b. Peningkatan pemenuhan kebutuhan listrik
 - c. Peningkatan akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi

- d. Peningkatan tata kelola energi dan sumber daya alam yang berkelanjutan
 - e. Peningkatan pengelolaan SDA dan bahan tambang yang memberi manfaat ekonomi bagi pendapatan daerah dan masyarakat sekitar dengan dampak lingkungan yang minimal.
 - f. Peningkatan kualitas pengelolaan DAS dan peningkatan luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi
6. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat
- a. Penurunan angka kemiskinan
 - b. Penurunan angka pengangguran
 - c. Terwujudnya keseimbangan antar jumlah penduduk dengan perkembangan sosial dan ekonomi

Berbagai program prioritas tersebut akan didukung oleh rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021, menempatkan pembangunan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terutama untuk mendukung misi ke 1 (satu) yaitu ” ***Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, dan partisipatif, yang berorientasi pada pelayanan publik***” dan misi ke 4 (empat) yaitu ” ***Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan***”. Dalam mewujudkan misi ke-1 dan ke-4 tersebut maka program pembangunan khusus urusan pilihan bidang penanaman modal daerah dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi.
- b. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

B. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2016-2021

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2016-2021 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisikan tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun

waktu lima tahun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi beserta Strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi dan peran yang diamanahkan.

a. Visi

Besarnya tantangan sebagai konsekuensi dari adanya era reformasi dan peningkatan persaingan di era globalisasi serta tuntutan masyarakat akan pelayanan prima, ditambah kurangnya sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan kualitas, mendorong DPMPTSP Provinsi Jambi mempersiapkan diri dan berupaya menangkap peluang-peluang baru.

Untuk tetap eksis dan unggul dalam suatu tahapan yang konsisten, konsekuen dan berkelanjutan, maka DPMPTSP Provinsi Jambi harus meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat yang dituangkan dalam visi. Dimana visi adalah suatu gambaran dan harapan yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi, atau pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi akan dibawa dan berkarya agar tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Dengan pengertian tersebut, maka visi DPMPTSP Provinsi Jambi yang ingin dicapai yakni :

“Terwujudnya Penanaman Modal Yang Tumbuh dan Berkembang Secara Berkelanjutan Menuju Jambi Tuntas 2021”

b. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh organisasi agar tujuannya dapat terlaksana dan berhasil dengan optimal serta sesuai dengan visi yang diinginkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh aparatur DPMPTSP Provinsi Jambi dan pihak-pihak yang berkepentingan (*customer* dan *stakeholders*) dapat mengenali tugas pokok dan fungsi organisasi serta dapat mengetahui peran dan program-programnya serta hasil dan manfaat yang akan diperoleh diwaktu-waktu mendatang.

Guna mewujudkan visi tersebut diatas, DPMPTSP Provinsi Jambi telah menetapkan 2 misi yang diemban beserta penjelasan sebagai berikut:

1. Mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing, dengan sasaran strategis
2. Mewujudkan investasi yang berkualitas dan berkelanjutan.

c. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu lima tahun kedepan didasarkan pada hasil identifikasi potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur Jambi Periode 2016-2021. Dengan menggunakan visi dan misi sebagai acuan utama, tujuan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi dalam Lima Tahun Kedepan adalah :

1. Iklim Investasi yang kondusif dan berdaya saing;
2. Penanaman Modal yang berkualitas dan berkelanjutan.

d. Sasaran

Kondisi iklim investasi dan penanaman modal tidak bisa dilepaskan dari keadaan perekonomian dalam negeri saat ini dengan proyeksinya untuk lima tahun mendatang. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ingin menciptakan iklim investasi yang kondusif dan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan. Untuk itu diharapkan terjadi peningkatan peran penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu mulai tahun 2016 sampai tahun 2021.

Tujuan 1 yaitu : ***IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF DAN BERDAYA SAING***

Sasaran yang ingin dicapai antara lain :

Sasaran strategis 1 *Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing* dengan indikator kinerja :

1. Lama hari pengurusan perizinan;
2. Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan; dan
3. Indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal;

Sasaran strategis 2 *Meningkatnya realisasi Investasi* dengan indikator kinerja :

1. Pertumbuhan realisasi investasi; dan
2. Nilai realisasi investasi.

Tujuan 2 yaitu : ***PENANAMAN MODAL YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN.***

Sasaran yang ingin dicapai antara lain :

Sasaran strategis 3 *Meningkatnya daya tarik investasi di Provinsi Jambi* dengan indikator kinerja : Persentase peningkatan rencana investasi di Provinsi Jambi.

Sasaran strategis 4 *Tersusunnya perencanaan investasi yang interaktif, kolaboratif, implementatif, harmonis dan berwawasan lingkungan dalam rangka peningkatan daya saing* dengan indikator kinerja Pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal di Provinsi Jambi.

Gambar 1.

Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi 2016 -2021

MISI	Mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing		Mewujudkan investasi yang berkualitas dan berkelanjutan	
TUJUAN	Iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing		Penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan	
SASARAN	Meningkatnya Kualitas pelayanan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing	Meningkatnya realisasi investasi	Meningkatnya daya tarik investasi di Provinsi Jambi	Tersusunnya perencanaan investasi yang interaktif, kolaboratif, implementatif, harmonis dan berwawasan lingkungan dalam rangka peningkatan daya saing

e. Strategi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi tersebut, maka

kiranya perlu disusun strategi yang didalamnya memuat upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan dan program-program serta merupakan factor penting dalam proses perencanaan.

Strategi sebagai rencana menyeluruh dan terpadu dari kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mencapai tujuannya, yaitu :

1. Menciptakan kepastian hukum terkait investasi dan dunia usaha;
2. Memberikan kemudahan kepastian dan transparansi proses perizinan melalui digitalisasi;
3. Meningkatkan sarana, prasarana dan aparatur yang kompeten dalam pelaksanaan tugas;
4. Meningkatkan pemantauan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal;
5. Meningkatkan kualitas promosi investasi yang terpadu dan efektif bagi investor Dalam dan Luar Negeri;
6. Meningkatkan peran UKM dalam perekonomian daerah melalui kemitraan dengan usaha besar PMA dan PMDN; dan
7. Membuat peta potensi investasi Provinsi Jambi pada sector prioritas dalam rangka peningkatan daya saing.

f. Program Prioritas

Pada tahun 2017 ini Program Prioritas yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :

1. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
Program ini bertujuan untuk menarik calon investor untuk berinvestasi di Provinsi Jambi
2. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan realisasi investasi baik dari PMA maupun PMDN.

Tabel 2.1
Hubungan antara Tujuan dan Sasaran dengan Program

Tujuan	Sasaran	Program
iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya Kualitas pelayanan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing Meningkatnya realisasi investasi 	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya daya tarik investasi di Provinsi Jambi Tersusunnya perencanaan investasi yang interaktif, kolaboratif, implementatif, harmonis dan berwawasan lingkungan dalam rangka peningkatan daya saing 	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

g. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagaimana telah diatur dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku instansi Pemerintah perlu menetapkan Keputusan Menteri dimaksud. Hal ini sejalan dengan penyempurnaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana yang telah diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi sesuai amat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

IKU (Key Performance Indikator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu Tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi sesuai periode Renstra adalah sebagaimana table 2.2. Dibawah ini :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan Formulasi Hitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Kualitas pelayanan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing	Lama hari pengurusan perizinan.	Rata-rata hari pengurusan perizinan yang telah diterbitkan pada tahun yang sedang berjalan.	DPMPTSP Provinsi Jambi	Laporan hasil inventarisasi
	Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	Realisasi jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan pada Tahun yang sedang berjalan		Laporan hasil pelayanan perizinan
	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman Modal	Permenpan RB No.16 Tahun 2014 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik		Laporan hasil pendataan
Meningkatnya realisasi investasi	Pertumbuhan realisasi investasi	Perbandingan realisasi investasi antara tahun berjalan dengan tahun yang lalu.	DPMPTSP Provinsi Jambi	Laporan Kegiatan Penanaman Modal
	Nilai realisasi investasi	Realisasi Investasi PMA/PMDN pada Tahun yang sedang berjalan		Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
Meningkatnya daya tarik investasi di Provinsi Jambi	Peningkatan rencana investasi di Provinsi Jambi	Nilai investasi yang berasal dari Izin Prinsip yang dikeluarkan pada Tahun Berjalan	DPMPTSP Provinsi Jambi	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
Tersusunnya perencanaan investasi yang interaktif, kolaboratif, implementatif, harmonis dan berwawasan lingkungan dalam rangka peningkatan daya saing	Pemetaan dan Perencanaan pengembangan penanaman modal di Provinsi Jambi	Realisasi perencanaan yang dibuat pada tahun yang sedang berjalan	DPMPTSP Provinsi Jambi	Laporan Hasil Pemetaan

C. Penetapan/Perjanjian Kinerja 2017

Penetapan/Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator

kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan Penyusunan Penetapan/Perjanjian Kinerja antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan Monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Rincian penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang meliputi Program, sasaran, indikator kinerja, kegiatan serta anggaran selengkapnya dapat dilihat pada table 2.3 Penetapan/Perjanjian Kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Rincian Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.000)
Meningkatnya Kualitas pelayanan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing			Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi	1.374.046,4
	Lama hari pengurusan perizinan.	10 Hari	- Koordinasi Pembinaan Perizinan Penanaman Modal dan PTSP di Provinsi Jambi	250.000
			- Advokasi Permasalahan Penanaman	101.500
	Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	10%	- Percepatan penyelesaian pelayanan Perizinan	378.095
	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman Modal	B	- Survey Indeks Kepuasan Konsumen	145.000
Meningkatnya realisasi investasi	Pertumbuhan realisasi investasi	10%	- Pembinaan Penanaman Modal	209.061,4
	Nilai realisasi investasi	- PMA : Rp. 4,2T	- Forum Komunikasi	290.390

	- PMDN : US\$ 130,35 (juta)	Penanaman Modal
--	--------------------------------	-----------------

Meningkatnya daya tarik investasi di Provinsi Jambi				Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	2.151.235
	Peningkatan rencana investasi di Provinsi Jambi	30%		- Kegiatan Temu Usaha dan Promosi Investasi Luar Negeri	550.000
				- Kegiatan Temu Usaha dan Promosi Investasi Dalam Negeri	639.160
				- Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan promosi investasi	88.000
				- Peningkatan Kemitraan strategis untuk pengembangan investasi Provinsi Jambi	270.000
Tersusunnya perencanaan investasi yang interaktif, kolaboratif, implementatif, harmonis dan berwawasan lingkungan dalam rangka peningkatan daya saing	Pemetaan dan Perencanaan pengembangan penanaman modal di Provinsi Jambi	1 Dokumen		- Pengembangan Potensi Investasi	240.000
				- Penyusunan Pemetaan Investasi Provinsi	210.000
				- Harmonisasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	154.075

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja diperlukan dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam pelaksanaan kegiatan/ program/kebijakan mencapai yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran dengan rencana kinerja (*performance*) yang dicapai organisasi.

Untuk melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja sasaran, digunakan kerangka pengukuran kinerja dengan skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1
Kerangka Pengukuran Kinerja

Persentase Pencapaian Sasaran	Kriteria
≥ 100%	Sangat Baik
90% – 99,99%	Baik
70% - 89,99%	Cukup Baik
50% - 69,99%	Kurang Baik
≤ 49,99%	Tidak Baik

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 yang disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi Jambi Tahun 2016-2021.

Pengukuran tingkat capaian kinerja DPMPTSP Provinsi Jambi Tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi dari masing-masing indikator kinerja. Hasil perbandingan tersebut akan diperoleh persentase pencapaian target. Rincian tingkat capaian masing-masing indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Capaian Realisasi Th.2016	Tahun 2017			Kriteria
			Target	Realisasi	%	
Sasaran Strategis 1						
Meningkatnya kualitas Pelayanan Penanaman Modal dalam Rangka Peningkatan Daya Saing						
1	Rata-rata lama hari pengurusan perizinan	14 Hari	10 Hari	10 Hari	100	Sangat Baik
2	Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	73,44%	10%	6,99%	69,9	Kurang Baik
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal	B	A	A	100	Sangat Baik
Sasaran Strategis 2						
Meningkatnya realisasi Investasi						
1	Pertumbuhan realisasi investasi	33,21%	10%	12,02%	120,17 %	Sangat Baik
2	Nilai Realisasi Investasi					
	- PMDN (Rp. Triliun)	3,884.44	4,283.69	4,2608	99,46	Baik
	- PMA (US\$. Juta)	61,04	130,35	76,8345	58,94	Kurang Baik
Sasaran Strategis 3						
Meningkatnya Daya Tarik investasi di Provinsi Jambi						
1	Persentase peningkatan rencana investasi di Provinsi Jambi	15,53	30%	89,62%	298,72	Sangat Baik
Sasaran Strategis 3						
Tersusunnya perencanaan investasi yang integrative, kolaboratif, implementatif, harmonis dan berwawasan lingkungan dalam rangka peningkatan daya saing						
1	Pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal di Provinsi Jambi	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Sangat Baik

A. Capaian Kinerja Organisasi

Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pada Tahun Anggaran 2017, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menetapkan 4 sasaran strategis yang akan dicapai. Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi pada kriteria **“Sangat Baik”**. Dengan persentase capaian secara

keseluruhan sebesar 698,15 dari pengukuran 7 Indikator. Realisasi sampai akhir Tahun 2017 menunjukkan bahwa sebanyak 5 Indikator telah dicapai dengan hasil yang **“Sangat Baik”**, 1 Indikator **“Kurang Baik”**, 1 indikator **“Cukup Baik”**

Pencapaian Kinerja per sasaran dijelaskan sebagai berikut :

1. SASARAN STRATEGIS SATU

SASARAN STRATEGIS 1

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dan Rangka Peningkatan Daya Saing”

Dalam praktek good governance, pelayanan publik dalam hal perizinan maupun non perizinan merupakan wujud pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Di era modern saat ini penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian. Untuk itu peran pemerintah daerah dalam rangka untuk menumbuhkan sektor ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan menjadi perhatian utama.

Dalam pelayanan terdapat prosedur yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan suatu kegiatan. Prosedur sangat penting bagi pelayanan karena apabila pada pelayanan memiliki prosedur yang tidak baik maka pelayanan berjalan tidak teratur dan memerlukan waktu yang panjang. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu telah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1018/Kep.Gub/DPM-PTSP-9/2017 tentang SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Efisiensi dan efektifitas pengaturan perizinan mempunyai kontribusi terhadap peningkatan iklim usaha dan daya saing suatu daerah.

Jumlah Perizinan merupakan komponen penting dalam pendataan dan proses guna pemantauan kegiatan usaha, melalui perizinan pemerintah mendapatkan kewenangan untuk mengetahui dan mengatur tata niaga dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan kebijakan. Peningkatan jumlah Perizinan dan Non Perizinan menunjukkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Jambi kepada masyarakat.

Untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan harus dilakukan suatu pengukuran Kepuasan terhadap Pelayanan oleh masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang RI No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) IKM merupakan tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Disamping itu IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Survei kepuasan masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah ada 9 indikator (unsur) yang menjadi acuan untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat akan pelayanan publik. Yang selanjutnya dituangkan pada kuisisioner dengan memilih minimal 150 orang pengguna layanan yang dipilih secara acak. Adapun 9 Unsur masing masing unit pelayanan sebagai berikut :

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
3. Waktu Penyelesaian
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9. Sarana Prasarana.

Capaian kinerja sasaran tersebut diatas, diukur dengan 3 (Tiga) indikator kinerja. Secara umum kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada sasaran I (satu) ini telah memberikan capaian yang **cukup baik**, ini terlihat dari angka realisasi rata-rata 89,96 persen. Secara spesifik capaian indikator kinerja sasaran strategis 1 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

Indikator Kinerja	Capaian Realisasi Th. 2016	Target	Realisasi	%
Lama hari pengurusan perizinan	14 Hari	10 Hari	10 Hari	100
Persentase Peningkatan jumlah Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	73,44%	10%	6,99%	69,9
Indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal	B	A	A	100
Rata-rata Capaian Sasaran Staregis 1				89,96

Adapun analisis capaian kinerja pada sasaran strategis 1 diuraikan sebagai berikut :

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2017

Pada Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk sasaran strategis satu ***“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dan Rangka Peningkatan Daya Saing”*** yang menjadi indikator kinerja utamanya adalah :

1. Lama Hari Pengurusan Perizinan
2. Persentase Peningkatan Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Penanaman Modal.

Uraian perbandingan antara target dan realisasi kinerja per indikator dijelaskan sebagai berikut :

Untuk indikator pada sasaran satu yang lain telah mencapai target dengan kriteria “Sangat Baik”.

Lama Hari pengurusan Perizinan

Pada tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi mampu mencapai target yang telah ditetapkan dalam hal lama hari pengurusan perizinan yaitu rata –rata selama 10 Hari.

Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan Bila dibandingkan target dan realisasi kinerja pada tahun 2017 hanya indikator kedua yang belum mencapai target yaitu persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan dengan jumlah perizinan yang diterbitkan sebanyak 566 izin dari target 10% atau hanya mencapai 6,99% persen dari target yang telah ditetapkan. Adapun jumlah perizinan yang diterbitkan perbidang tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4

Rekapitulasi per Sektor Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan				
Periode Januari s/d Desember 2017				
No	Bidang	Diterbitkan		Jumlah Keseluruhan
		Perizinan	Non Perizinan	
1	Penanaman Modal	29	2	31
2	Ketahanan Pangan	-	-	-
3	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	7	-	7
4	Sosial	-	12	12
5	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	33	19	52
6	Koperasi dan UKM	-	-	-
7	Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Peternakan	26	-	26
8	Perkebunan	13	7	20
9	Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	-
10	Kesehatan	29	20	49
11	Energi dan Sumber daya Mineral	196	-	196
12	Perikanan dan Kelautan	42	-	42
13	Industri dan Perdagangan	42	33	75
14	Lingkungan Hidup	2	-	2
15	Kehutanan	9	3	12
16	Perhubungan	11	31	42
17	Pendidikan	-	-	-
18	Komunikasi dan Informatika	-	-	-
TOTAL		439	127	566

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan Penanaman Pada Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah berhasil memenuhi target berkaitan dengan Indeks Kepuasan

Modal Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Penanaman Modal dengan pengukuran Nilai Rata-rata (NRR) Indeks Kepuasan Masyarakat 3,49 jika di lihat pada nilai persepsi maka IKM Terhadap Pelayanan DPMPSTP berada pada mutu pelayanan A (Sangat Baik). Adapun hasil pengukuran nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.5
Nilai Rata-rata dan Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2017

No.	Unsur Pelayanan	NRR
1.	Persyaratan Pelayanan	3,376
2.	Prosedur pelayanan	3,352
3.	Waktu pelayanan	3,358
4.	Biaya/Tarif Pelayanan	3,370
5.	Produk/Hasil Pelayanan	3,364
6.	Kemampuan Petugas Pelayanan	3,418
7.	Perilaku petugas Pelayanan	3,436
8.	Maklumat Pelayanan	3,315
9.	Mekanisme pengaduan pelayanan	3.782

Tabel 3.6
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	TIDAK BAIK
1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	KURANG BAIK
2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	BAIK
3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	SANGAT BAIK

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun 2016

Apabila dibandingkan antara Realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2017 dengan Realisasi kinerja tahun 2016 yang lalu. Untuk masing-masing indikator mengalami peningkatan baik dari realisasi maupun capaian kinerja. Perbandingan Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun 2016 masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai

berikut :

- Lama Hari pengurusan Perizinan* Pada tahun 2016 realisasi pencapaian indikator Lama hari pengurusan perizinan selama 14 Hari pada tahun 2017 ini lama pengurusan perizinan bisa mencapai rata-rata 10 hari. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja yang dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi Jambi
- Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan* Untuk persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan untuk tahun 2017 ini bila dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2016 mengalami penurunan. Tetapi secara jumlah izin yang dikeluarkan pada tahun 2017 ini mengalami peningkatan sebesar 6,99 persen dari capaian realisasi tahun 2016 yaitu sebesar 566 perizinan. Perkembangan Jumlah Perizinan per bidang tahun 2015 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.7

Perkembangan Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan per Bidang Perizinan Tahun 2016 s.d 2017				
No	Bidang dan Sub Bidang	Tahun		
		2015	2016	2017
1	Penanaman Modal	34	51	31
2	Ketahanan Pangan	-	-	-
3	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	6	8	7
4	Sosial	47	48	12
5	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	52
6	Koperasi dan UKM	-	-	-
7	Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Peternakan	-	-	26
8	Perkebunan	25	56	20
9	Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	-
10	Kesehatan	31	45	49
11	Energi dan Sumber daya Mineral	61	212	196
12	Perikanan dan Kelautan	3	29	42
13	Industri dan Perdagangan	6	22	75
14	Lingkungan Hidup	14	19	2
15	Kehutanan	31	24	12
16	Perhubungan	47	15	42
17	Pendidikan	-	-	-
18	Komunikasi dan Informatika	-	-	-
TOTAL		305	529	566

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan Penanaman Modal

Indikator Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Penanaman Modal juga mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2016. Pada tahun 2016 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat berada pada Mutu Pelayanan B yaitu dengan Nilai Rata-rata IKM 3,245 sedangkan pada tahun 2017 Nilai Rata-rata IKM sebesar 3,49 atau berada pada nilai interval konversi IKM berada pada 81,26 -100 dengan kriteria mutu pelayanan A (Sangat Baik).

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 dengan Target Jangka Menengah (periode Renstra 2016-2021)

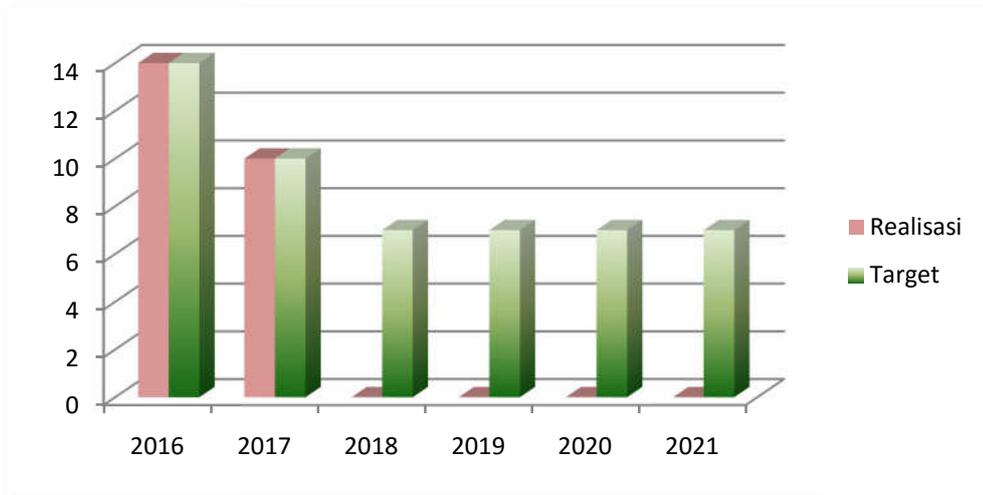
Jika dibandingkan Realisasi Kinerja per Indikator dengan Target Jangka Menengah (Periode 2016 – 2021). Walaupun ada Indikator Kinerja yang kurang baik tidak mencapai target pada tahun 2017 tapi secara keseluruhan realisasi kinerja pada sasaran ini masih dalam kriteria baik dengan rata-rata capaian 89,96 persen. Untuk mencapai sasaran jangka menengah (2016 – 2021) untuk sasaran Satu ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Jambi optimis target jangka menengah yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan cara lebih giat berusaha dan memperbaiki kelemahan yang ada pada internal DPMPTSP serta memaksimalkan lagi peluang dan kekuatan dalam rangka menjalankan program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis satu ini. Penjelasan Perbandingan realisasi kinerja per indikator dengan target jangka menengah sebagai berikut :

Lama Hari pengurusan Perizinan

Target Lama hari pengurusan perizinan sesuai yang terdapat pada Renstra DPMPTSP Provinsi Jambi pada akhir periode renstra tahun 2021 adalah 7 hari. Jika dibandingkan dengan dua tahun berjalan ada peningkatan di tahun 2017 ini. DPMPTS terus

berbenah agar target jangka menengah dapat dicapai. Berikut grafik pencapaian realisasi dan target yang harus di capai pada tahun 2016-2021 :

Grafik 3.1
Pencapaian Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jambi.



Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan pada akhir priode tahun 2021 adalah 90 persen dari awal periode renstra. Pada tahun 2016 awal periode renstra jumlah perizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP adalah 529 perizinan dan non perizinan. Maka jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan harus dicapai oleh DPMPTS sampai akhir priode renstra adalah lebih dari 1000 perizinan. Dengan perincian persentase target pertahun yaitu :

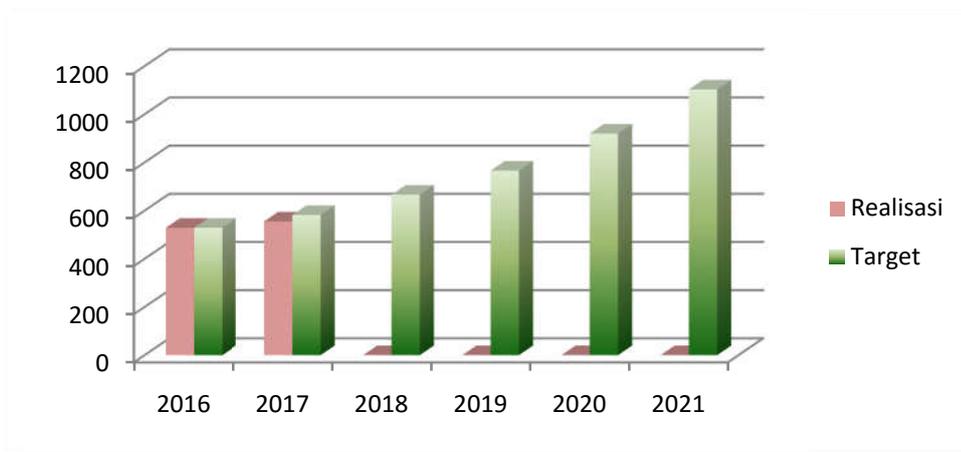
Berikut grafik pencapaian realisasi dan target yang harus di capai pada tahun 2016-2021 untuk indikator persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan :

Tabel 3.8

Target dan Realisasi Pencapaian Jumlah Perizinan							
Periode 2016 s/d 2021							
No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Target	10%	10%	15%	15%	20%	20%
2	Realisasi	529	555	-	-	-	-

Grafik 3.2

Pencapaian Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jambi.



Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan Penanaman Modal Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2017 telah mencapai target sesuai dengan yang ditetapkan pada target pada periode renstra (2016-2021) dengan mencapai nilai A (sangat baik) hingga akhir priode renstra, kondisi ini akan tetap dipertahankan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan semakin meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan Pada sasaran strategis satu ini Guna Meningkatkan Pelayanan Penanaman Modal dalam rangka peningkatan daya saing, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah berhasil meningkatkan capaian realisasi dan memenuhi target yang telah ditetapkan. Akan tetapi untuk target indikator persentase peningkatan jumlah perizinan

dan non perizinan yang diterbitkan belum dapat terpenuhi. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Kualitas Sumber daya Manusia.

Penyelenggaraan pelayanan perizinan tidak lepas dari kebutuhan Sumber Daya Manusia yang mumpuni dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu setiap petugas yang akan menjalankan tugasnya dituntut untuk memiliki kemampuan dan integritas sesuai dengan tugas yang akan dilaksankannya.

Dalam rangka pelayanan perizinan Pada saat ini DPMPTSP Provinsi Jambi memiliki 4 orang karyawan di Front office dan Orang back office dibantu dengan Orang tim teknis dari perangkat daerah terkait permasalahan yang umumnya dialami adalah proses rekomendasi dari tim teknis masih memerlukan waktu yang relative lama disamping itu pembekalan dan pengetahuan Aparatur DPMPTSP dibidang pelayanan masih minim.

2. Kurangnya pengetahuan Masyarakat pengguna jasa layanan.

Kurangnya pengetahuan masyarakat pengguna jasa layanan perizinan DPMPTSP secara keseluruhan masyarakat belum semua memahami syarat-syarat yang yang harus dipenuhi pada saat pengajuan izin.

3. Komitmen Perangkat Daerah terkait.

Belum seluruhnya perangkat daerah yang mengeluarkan perizinan melimpahkan wewenang perizinan kepada DPMPTSP Provinsi Jambi.

Dalam rangka untuk meningkatkan capaian target ditahun yang akan datang. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah dan akan

melakukan hal hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pengetahuan Aparatur dengan mengikutkan Aparatur DPMPTSP pada Pelatihan-pelatihan yang mendukung Pelayanan terhadap Perizinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Melaksanakan Sosialisasi mengenai peraturan, tata cara perizinan kepada masyarakat dan akan melaksanakan layanan perizinan *on the spot* yaitu dengan membuka gerai-gerai pelayanan pada setiap event besar seperti Pameran dan kegiatan di pusat perbelanjaan.
3. Lebih gencar melaksanakan forum-forum komunikasi dan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait sehingga proses pelayanan perizinan tidak lagi membutuhkan waktu yang lama.
4. Telah membuat aplikasi pelayanan berbasis web (SIAPPO) Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan Perizinan On line yang berisikan tentang seluruh kegiatan dan pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP Provinsi Jambi. Sehingga informasi mengenai tata cara sampai layanan pengaduan tentang perizinan dapat di akses oleh masyarakat banyak.

Analisa atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

Pada sasaran strategis satu ini Sumber daya yang dipergunakan adalah Jumlah Aparatur dan Sarana dan Prasarana. Seperti yang telah dijelaskan diatas Aparatur DPMPTSP masih banyak yang belum mengikuti pelatihan dan Bimtek mengenai Pelayanan Perizinan, disamping jumlah aparatur yang sedikit jumlah Bidang dan Sub Bidang Perizinan yang dikerjakan juga relative banyak. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi No. 31 Tahun 2017 ada

18 Bidang perizinan dan 264 jenis Perizinan dan Non Perizinan yang harus dikuasai oleh Aparatur DPMPTSP Provinsi Jambi.

Disamping itu Sarana dan prasarana penunjang untuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi sesuai dengan Permendagri Nomor 138 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu daerah secara bertahap akan dipenuhi hal ini mengingat keterbatasan Anggaran yang dimiliki oleh DPMPTSP Provinsi Jambi.

DPMPTSP Provinsi Jambi akan tetap berusaha untuk memenuhi Target yang telah ditetapkan.

Analisis

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mendukung sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing” melalui Program Peningkatan Iklim Investasi dan Promosi Investasi DPMPTSP Provinsi Jambi telah melaksanakan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis antara lain :

1. Kegiatan Koordinasi Pembinaan Perizinan Penanaman Modal dan PTSP di Provinsi Jambi.
2. Kegiatan Survey Indeks Kepuasan Konsumen
3. Kegiatan Percepatan Penyelesaian Pelayanan Perizinan
4. Kegiatan Advokasi permasalahan penanaman Modal.

Koordinasi Pembinaan Perizinan Penanaman Modal dan PTSP Di Provinsi Jambi

Rakor PTSP Kab/Kota se-Provinsi Jambi dilaksanakan pada tanggal 16-17 Mei 2017. Kegiatan ini bertujuan untuk persamaan persepsi mengenai kebijakan dan evaluasi kegiatan di masing-masing PTSP baik ditingkat Pusat, Provinsi dan Daerah, agar mengikuti Standar Nasional yang telah disusun pemerintah dalam hal regulasi dibidang investasi. Sehingga sinkronisasi antara pemerintah pusat dan

daerah dapat mewujudkan iklim investasi yang sehat dan kompetitif.



- Rakor Penerapan Kebijakan Peningkatan Kinerja PTSP yang dilaksanakan pada tanggal 15 -16 November 2017. Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan public yang lebih baik dan berkualitas. Baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi

Survey Indeks Kepuasan Konsumen Kegiatan Survey Indeks Kepuasan Konsumen masyarakat dilaksanakan pada bulan Januari s.d Desember 2017. Tempat pelaksanaan survey indeks kepuasan konsumen bertempat di Kantor DPMPSTSP Provinsi Jambi. Tahapan kegiatan survey yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- **Persiapan**
Dalam tahapan persiapan dilakukan pembahasan kuesioner oleh pusat kajian dan studi kebijakan public dan bimbingan kepada DPMPSTSP, menyusun jadwal pengumpulan data, melakukan briefing kepada petugas lapangan agar paham dan mengerti cara-cara pengumpulan data dan maksud dari kuesioner, menyusun criteria responden dan menentukan metode pemilihan responden.
- **Pengumpulan Data**
Data yang dikumpulkan merupakan data primer yang langsung didapat pada saat proses interview dengan responden dengan jumlah responden 164 orang. Kegiatan pengumpulan data dilaksanakan pada periode minggu pertama bulan juli sampai dengan minggu ke empat bulan desember tahun 2017.
- **Pengolahan dan analisis data.**
Data yang telah terisi kemudian dikumpulkan dan diolah secara kuantitatif dengan menggunakan aplikasi excel. Selanjutnya diolah dengan uji statistic untuk memperoleh informasi yang lebih baik terhadap data yang didapat agar hasil survey bermanfaat.
- **Penyusunan Laporan**
Hasil survey disusun dalam bentuk laporan yang akan menjadi dokumen penting yang menyajikan

informasi tentang perkembangan unit pelayanan perizinan DPM-PTSP Provinsi Jambi dari olahan dan analisis data yang dapat dijadikan bahan dasar pengusulan peningkatan atau keperluan lain berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan Percepatan Penyelesaian Pelayanan Perizinan Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan maka perlu dilakukan Kegiatan percepatan penyelesaian pelayanan perizinan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dan calon investor, hal ini sangat dibutuhkan dunia usaha khususnya investor yang berkeinginan berinvestasi di Provinsi Jambi. Investasi dari pihak swasta sangat dibutuhkan dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan daerah seperti penyerapan tenaga kerja, pembukaan lapangan usaha dan lain sebagainya.

Kegiatan ini lebih menitik beratkan kepada penyelenggaraan pelayanan perizinan berupa percepatan penyelesaian peraturan gubernur tentang pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan. Sosialisasi SOP Pelayanan Perizinan dilakukan dalam rangka mewujudkan pelayanan Publik yang berkualitas kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7 September 2017. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan yang sederhana, cepat, transparan dan akuntabel serta merumuskan standar baku pelayanan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Kegiatan Advokasi Permasalahan Penanaman Modal Kegiatan pelaksanaan advokasi permasalahan penanaman modal dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2017. Adapun tujuan dari dilaksanakannya kegiatan sosialisasi advokasi permasalahan penanaman modal adalah untuk memberikan pemahaman kepada aparat DPMPSTP dan stakeholders terhadap penanganan permasalahan penanaman Modal. Dan mendapatkan feedback berupa informasi yang diperlukan untuk menyusun kebijakan dalam penanganan permasalahan.



2. SASARAN STRATEGIS DUA

SASARAN STRATEGIS 2

“Meningkatnya Realisasi Investasi”

Peningkatan Investasi memiliki kontribusi sebagai pengungkit terhadap bergeraknya pembangunan ekonomi suatu daerah. Sebagian ahli ekonomi memandang pembentukan investasi merupakan faktor penting yang memainkan peran strategis terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu Daerah.

Ada beberapa anggapan mengenai manfaat investasi terhadap pertumbuhan

ekonomi Daerah yaitu :

1. Investasi akan menciptakan perusahaan-perusahaan baru, memperluas pasar atau merangsang penelitian dan pengembangan teknologi lokal baru.
2. Investasi akan meningkatkan daya saing industry ekspor, dan merangsang ekonomi local melalui pasar kedua (sector keuangan) dan ketiga (sector jasa/pelayanan).
3. Investasi akan meningkatkan pajak pendapatan dan menambah pendapatan daerah/Nasional, serta memperkuat nilai mata uang untuk pembiayaan impor.

Investasi merupakan salah satu faktor yang menentukan laju pertumbuhan ekonomi. Suatu daerah akan berkembang secara dinamis jika investasi yang dikeluarkan jauh lebih besar dari nilai penyusutan faktor-faktor produksinya. Daerah yang memiliki investasi yang lebih kecil dari pada penyusutan faktor produksinya akan cenderung mengalami perekonomian yang stagnasi. Meningkatnya investasi akan menjamin kontinuitas pembangunan ekonomi, menyerap tenaga kerja dan menekan kemiskinan yang muaranya akan memacu perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

Oleh karena itu guna menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing peningkatan realisasi investasi harus menjadi salah satu perhatian Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.

Capaian kinerja sasaran tersebut diatas, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja. Secara umum, kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi pada sasaran 2 (dua) ini telah memberikan capaian yang "Baik", ini terlihat dari angka realisasi rata-rata keseluruhan sebesar 92,95 persen. Secara spesifik capaian indikator kinerja sasaran strategis 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

Indikator Kinerja	Capaian Realisasi Th. 2016	Target	Realisasi	%
Pertumbuhan realisasi investasi	33,21%	10%	12,02%	120,17%
Nilai Realisasi Investasi				
- PMDN (Rp. Triliun)	3,884.44	4,283.69	4,2608	99,46
- PMA (US\$. Juta)	61,04	130,35	76,8345	58,94
Rata-rata capaian sasaran strategis 2				92,85

Adapun analisis capaian kinerja pada sasaran strategis 1 diuraikan sebagai berikut :

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2017

Pada Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk sasaran strategis satu “***Realisasi Investasi***” yang menjadi indikator kinerja utamanya adalah :

1. Pertumbuhan Realisasi Investasi; dan
2. Nilai Realisasi Investasi.

Uraian perbandingan antara target dan realisasi kinerja per indikator dijelaskan sebagai berikut :

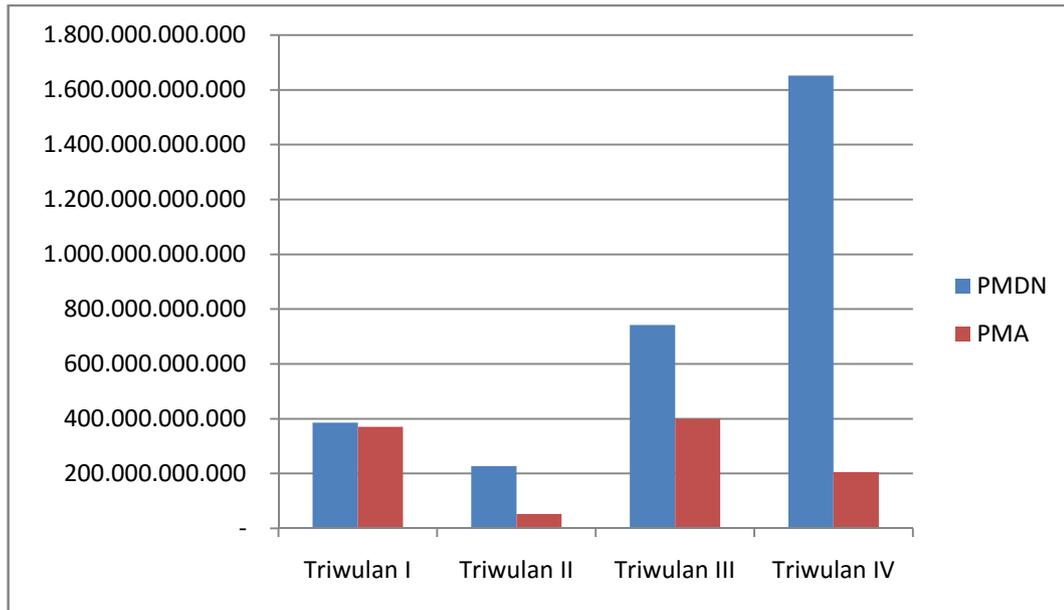
Pertumbuhan Realisasi Investasi

Bila dibandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2017 pertumbuhan investasi Provinsi Jambi mengalami peningkatan yaitu sebesar 12,02% dengan nilai realisasi investasi 5,2T dari target yang ditetapkan yaitu 10%, atau dengan kata lain untuk pengukuran indikator Pertumbuhan realisasi investasi Dinas Penanaman Modal masuk kedalam kriteria Sangat Baik dengan persentase 120,17%.

Nilai Realisasi Investasi

Realisasi Nilai Investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Tahun 2017 tidak mencapai target, untuk Nilai Realisasi Investasi PMDN hanya mencapai 99,46 % dari target yang telah ditetapkan sebesar 4,28 T. Sedangkan untuk nilai realisasi investasi PMA hanya mencapai 58,94% dari target yang telah ditetapkan sebesar 130,35 T. Realisasi Nilai Investasi Pada Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel Grafik berikut :

Grafik 3.3
Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA Tahun 2017 per Triwulan



Perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 dengan Target Jangka Menengah (periode Renstra 2016-2021)

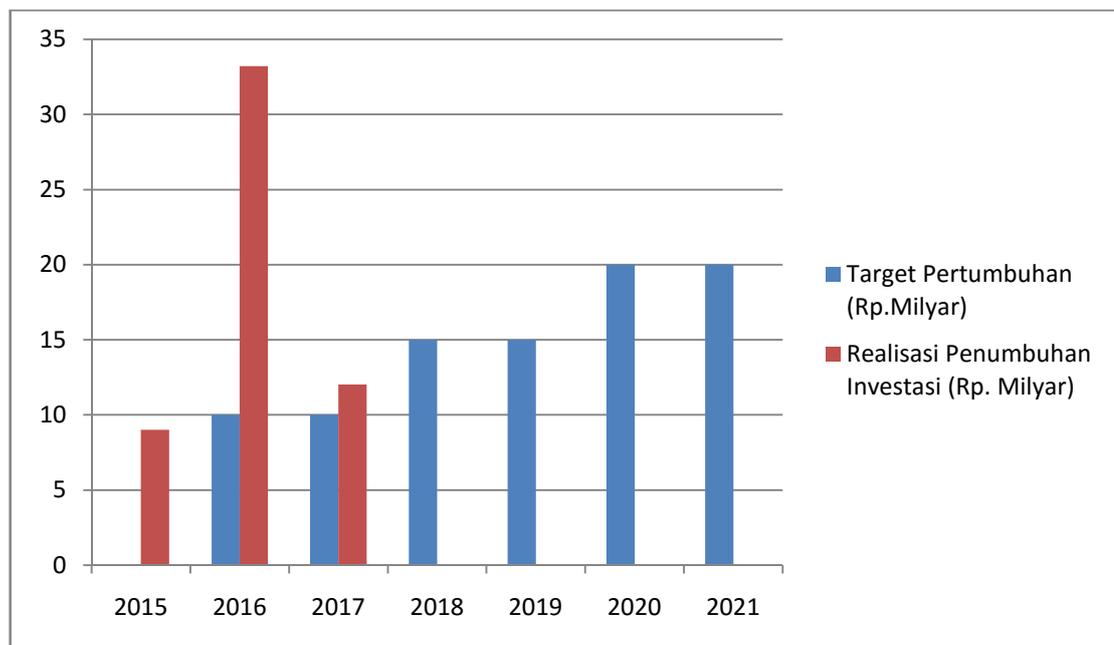
Jika dibandingkan antar realisasi kinerja indikator Pertumbuhan Investasi dan Nilai Investasi tahun 2017 dengan target jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi (periode Renstra 2016 – 2021) masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pertumbuhan Realisasi Investasi

Pada Tahun 2017 ini Realisasi Penumbuhan Investasi mengalami penurunan bila dibandingkan dengan capaian Penumbuhan Investasi Tahun 2016, pada tahun 2016 capaian penumbuhan investasi sebesar 33,21% sedangkan tahun 2017 penumbuhan investasi sebesar 12,02% akan tetapi dari sisi realisasi investasi Provinsi Jambi pada tahun 2017 ini mengalami peningkatan bila dibandingkan pada tahun 2016 yang hanya Rp.4,7T hal ini disebabkan karena mulai munculnya kesadarnya perusahaan untuk menyampaikan LKPM sesuai dengan perka BKPM No.14 Tahun 2017 tentang pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab

penanam modal yaitu pada pasal 7 butir c, menyampaikan LKPM. Jika dibandingkan dengan target periode 2016-2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi Optimis Target yang telah ditetapkan pada akhir periode dapat tercapai. Berikut Grafik Perbandingan Realisasi Penumbuhan Investasi dengan Target Penumbuhan Investasi Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Jambi

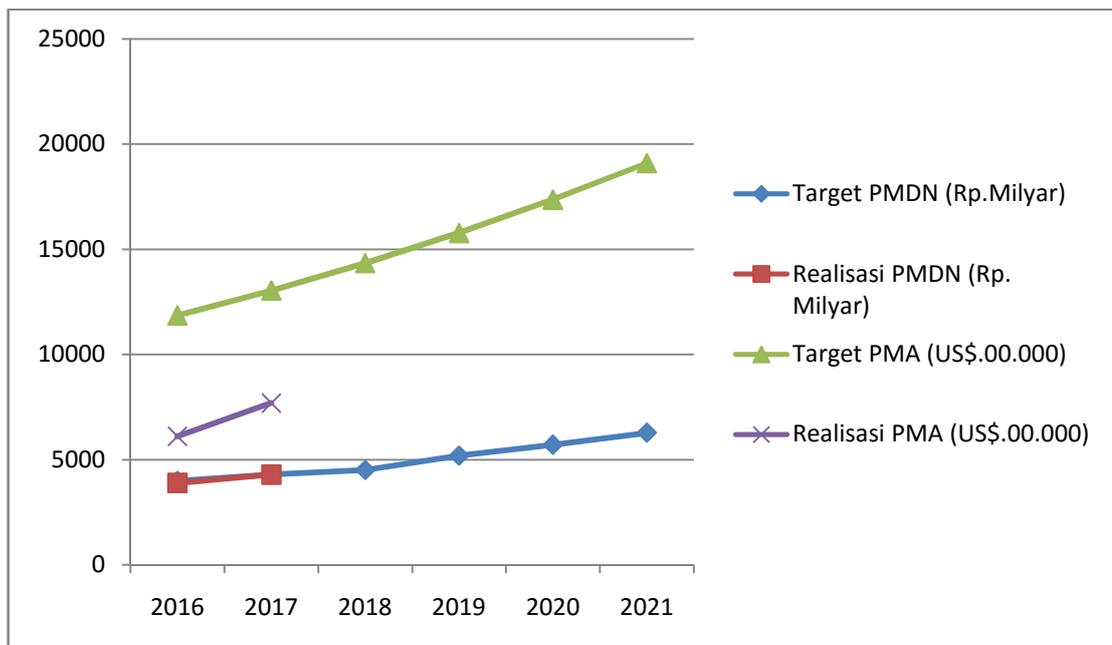
Grafik 3.4
Perbandingan Realisasi Penumbuhan Investasi dengan Target Penumbuhan Investasi Jangka Menengah 2016 – 2021



Nilai Realisasi Investasi Meskipun pada Tahun 2017 ini Target indikator Nilai Investasi tidak Tercapai akan tetapi Jika dilihat dari perbandingan dengan capaian realisasi pada tahun 2016 yang lalu Nilai Realisasi Investasi PMDN mengalami peningkatan sebesar 1,08% demikian juga dengan Nilai Realisasi Investasi PMA mengalami peningkatan 1,26% walaupun

peningkatannya tidak signifikan akan tetapi ini menunjukkan adanya usaha yang dilakukan untuk memenuhi target. Oleh karena itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi tetap optimis target hingga akhir periode dapat tercapai dengan perbaikan-perbaikan yang terus dilakukan. Target Pertumbuhan Investasi dan Nilai Realisasi Investasi Jangka Menengah dan capaian realisasi tahun 2017 dapat dilihat pada grafik berikut

Grafik 3.5
Perbandingan Nilai Realisasi PMDN, PMA dan Target Periode 2016 s.d 2017



Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada sasaran strategis dua Guna Meningkatkan Realisasi Investasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum berhasil meningkatkan capaian realisasi dan memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Belum disampaikannya LKPM oleh Perusahaan.

Ada beberapa perusahaan yang belum

menyampaikan LKPM kepada DPMPTSP Provinsi/Kab dan BKPM RI.

2. Belum Terlaksananya realisasi fisik di Lokasi Proyek. Ada beberapa perusahaan belum merealisasikan kegiatan penanaman modal secara fisik. Realisasi yang telah dilaksanakan oleh perusahaan antara lain mendapatkan izin local dari pemerintah Kabupaten setempat ataupun pematangan tanah.
3. Beberapa perusahaan telah menyampaikan LKPM tetapi tidak dapat ditemukan dilokasi proyek.
4. Ada beberapa perusahaan yang kegiatan penanaman modalnya terhenti.
5. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk melakukan kunjungan-kunjungan ke perusahaan yang lokasinya jauh dari pusat ibu kota kabupaten.

Dalam rangka untuk meningkatkan capaian target ditahun yang akan datang. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah dan akan melakukan hal hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif dan sinergis antar instansi teknis penanaman modal Kabupaten/Kota.
2. Memperbaiki kualitas dan kuantitas sector pertanian dan perkebunan dan energy terbarukan.

Solusi perbaikan yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan realisasi Investasi antara lain :

- Melakukan pendekatan persuasif secara intensif untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran pihak perusahaan untuk melaksanakan kewajiban terkait pengurusan perizinan.
- Perlu adanya koordinasi secara intensif antara pemberi izin dan pelaksana pemantauan di daerah terkait alamat ataupun kontak person penanggung jawab kegiatan investasi di lokasi proyek.

- Perlu ditingkatkan sosialisasi atau bimbingan teknis pengisian LKPM kepada Perusahaan. Sosialisasi atau Bimtek kepada PDKPM juga dapat dilaksanakan agar PDKM juga mempunyai kesamaan persepsi dalam mengevaluasi LKPM yang disampaikan oleh Perusahaan.
- Perlu dilakukan secara berkesinambungan bimbingan dan sosialisasi ketentuan pelaksanaan penanaman modal dengan jumlah peserta yang terus ditambah untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan perusahaan terhadap perundang-undangan penanaman modal.
- Koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi antara BKPM, PDPPM dan PDKPM serta Instansi teknis terkait agar tercapai peningkatan realisasi investasi di Provinsi Jambi.

Analisa atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

Ada 3 (tiga) penggunaan Sumber daya dalam rangka mendukung pencapaian kinerja indikator yang berhubungan dengan pencapaian realisasi investasi yaitu Sumber Daya Manusia (Aparatur DPMPTSP), Sarana prasarana dan Sumber pendanaan (APBD). Disamping jumlah aparatur DPMPTSP yang masih kurang, kualitas Aparatur Dinas Penanaman modal yang berkaitan dengan pencapaian peningkatan nilai investasi yang memahami tentang peraturan dan perundang-undangan penanaman modal juga masih terbatas. Disamping itu dalam mengumpulkan data melalui pelaksanaan pemantauan kewajiban perusahaan, sarana dan prasarana pendukung juga masih minim. Anggaran yang ada hanya sampai di ibukota kabupaten saja, sedangkan lokasi perusahaan yang akan dikunjungi berada di luar ibukota kabupaten dengan kondisi medan yang tidak bisa diprediksi sehingga keperluan Kendaraan operasional yang mumpuni juga

<p><i>Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja</i></p>	<p>sangat diperlukan.</p> <p>Untuk mendukung sasaran strategis “Meningkatnya Realisasi Investasi” melalui Program Peningkatan Iklim Investasi dan Promosi Investasi DPMPTSP Provinsi Jambi telah melaksanakan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Forum Komunikasi Penanaman Modal. 2. Kegiatan Pembinaan Penanaman Modal.
	<p>Berdasarkan hasil laporan akhir pelaksanaan kegiatan banyak sub-sub kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan III dan Triwulan IV sehingga capaian realisasi pada tahun 2017 ini tidak tercapai. Tetapi secara keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung sasaran strategis dua ini sangat berperan dalam rangka meningkatkan nilai investasi. Adapun penjelasan mengenai pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :</p>
<p>Kegiatan Forum Komunikasi Penanaman Modal.</p>	<p>Kegiatan forum komunikasi penanaman modal bertujuan untuk mengupdate data dan informasi realisasi secara akurat, komprehensif dan berkesinambungan. Pada kegiatan ini juga dilakukan review tentang penanaman modal secara keseluruhan dengan pembahasan secara mendalam mulai dari aspek administrasi dan legalitas perkembangan kegiatan penanaman modal sekaligus ancaman, tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal perusahaan bersangkutan. Ada 3 (tiga) sub bidang yang dilaksanakan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Konsolidasi Data Penanaman Modal pada tanggal 24 Agustus 2017 di ruang Aula DPM-PTSP. Hasil yang dicapai adalah terkonsolidasinya data realisasi dan perkembangan penanaman modal di provinsi Jambi dan diharapkan tercapainya kesamaan data realisasi investasi diantara DPMPTSP Kabupaten/Kota dan DPM PTSP Provinsi

Jambi.

2. Rapat Forum Komunikasi Penanaman Modal pada tanggal 30 Oktober 2017 di ruang Aula DPMPTSP PProvinsi Jambi dengan peserta dari Aparatur DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi, Perusahaan yang beroperasi di wilayah Provinsi Jambi dan Instansi terkait. Hasil yang dicapai adalah diharapkan tercapainya solusi berupa rekomendasi tindak lanjut permasalahan yang dihadapi perusahaan PMA/PMDN di Provinsi Jambi yang difasilitasi oleh DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota dan Instansi terkait se-Provinsi Jambi.



3. Melaksanakan Rapat Konsultasi Penanaman Modal pada tanggal 16 s/d 17 Desember 2017 di Ruang Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal dengan peserta dari Perusahaan

PMA/PMDN Provinsi Jambi. Hasil yang ingin dicapai adalah adanya pemahaman tentang tata cara pelaksanaan penanaman modal oleh Perusahaan PMA/PMDN di Provinsi Jambi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Meliputi klinik LKPM, Konsultasi Pelaksanaan Penanaman Modal, Konsultasi pembuatan hak akses aplikasi sistem informasi SPIPISE oleh perusahaan dan lain-lain yang diperlukan oleh perusahaan.



4. Melaksanakan rapat forum komunikasi penanaman modal ke II pada tanggal 18 Desember 2017 di ruang Aula DPMPTSP Provinsi Jambi dengan peserta Aparatur DPMPTSP Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi, Perusahaan PMA/PMDN yang beroperasi di

wilayah Provinsi Jambi dan Instansi terkait. Hasil yang diharapkan adalah tercapainya sinkronisasi dan persama persepsi tentang data perkembangan realisasi penanaman modal sehingga investasi dan iklim investasi yang kondusif di Provinsi Jambi.



5. Membuat Buku Profile Perusahaan Tahun 2017 dan Buku Perkembangan data investasi PMA/PMDN tahun 2016.

Kegiatan Pembinaan Penanaman Modal Kegiatan Pembinaan Penanaman Modal terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

1. Bimtek tata cara pengisian LKPM;
Kegiatan Bimbingan teknis Laporan Kegiatan Penanaman Modal dilaksanakan pada tanggal 28 April 2017, kegiatan ini bertujuan agar perusahaan

mengetahui dan melaporkan segala aktivitas penanaman modalnya secara rutin sesuai dengan tahapan perkembangan perusahaan. Kegiatan ini berguna untuk memantau dan mendata realisasi penanaman modal, membangun dan mengembangkan sistem informasi serta pengolahan data penanaman modal.



2. Bimtek dan sosialisasi Green Investment.

Kegiatan Bimbingan teknis dan sosialisasi Green Investment Se-Provinsi Jambi dilaksanakan pada tanggal 30 November 2017, diharapkan dari kegiatan ini dapat mewujudkan penanaman modal yang berwawasan ramah lingkungan.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi

3. SASARAN STRATEGIS TIGA

SASARAN STRATEGIS 3

“Meningkatnya daya tarik investasi”

Secara umum Provinsi Jambi menyadari bahwa untuk mempercepat proses pembangunan, dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Provinsi Jambi dihadapkan kepada dilema yang cukup rumit. Di satu sisi terdapat keinginan untuk membangun dengan menggunakan kemampuan sendiri tanpa harus bergantung kepada pihak lain. Di sisi lain, Provinsi Jambi mengalami keterbatasan dana untuk melaksanakan kegiatan pembangunannya. Sumber pendanaan yang secara kasat mata bisa menjadi alternatif untuk mewujudkan visi dan misi Provinsi Jambi adalah dengan menarik investasi baik domestik maupun asing.

Ada beberapa factor yang menentukan daya tarik investor untuk masuk ke suatu daerah yaitu, factor kelembagaan, sosial politik, ekonomi daerah, tenaga kerja dan infrastruktur fisik. Sebagai salah satu provinsi yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang, provinsi Jambi pun tak kalah gencarnya dalam upaya menarik investor. Hal ini ditunjukkan dengan upaya promosi yang dilakukan oleh Provinsi Jambi baik mengikuti pameran dalam negeri maupun pameran luar negeri.

Guna mewujudkan misi ke dua dari renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi yaitu Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan maka perlu dilakukan pengukuran terhadap sasaran strategis yang diemban antara lain meningkatnya daya tarik investasi di Provinsi Jambi dan tersusunnya perencanaan investasi yang integrative, kolaboratif, implementatif, harmonis dan berwawasan lingkungan dalam rangka peningkatan daya saing. Adapun capaian kinerja sasaran strategis tiga dan pengukuran masing-masing indikator Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.10

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

Indikator Kinerja	Capaian Realisasi Th. 2016	Target	Realisasi	%
Persentase peningkatan rencana investasi di Provinsi Jambi	33,5%	30%	410,8%	1369,3%
Total capaian sasaran strategis 3				1369,3%

*) Realiasi Rencana Investasi PMA dalam Kurs Rupiah Rp.13.300

Adapun analisis capaian kinerja pada sasaran strategis 3 diuraikan sebagai berikut :

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2017

Pada Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk sasaran strategis satu **“Meningkatnya daya tarik investasi”** yang menjadi indikator kinerja utamanya adalah persentase peningkatan rencana investasi di Provinsi Jambi. Rencana investasi diketahui pada saat perusahaan hendak mengajukan izin prinsip di Wilayah Provinsi Jambi.

Pada tahun 2017 realisasi rencana investasi di provinsi jambi sebesar Rp.295,7T dengan jumlah rencana tenaga kerja yang diperlukan sebanyak 10.867 orang. Pada tahun 2017 jumlah rencana investasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari target yang ditetapkan sebesar 1.369 persen dengan total realisasi sebesar Rp.293,7T (Kurs Rp.13.300). Penyebaran Rencana investasi PMA/PMDN tahun 2017 di wilayah Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

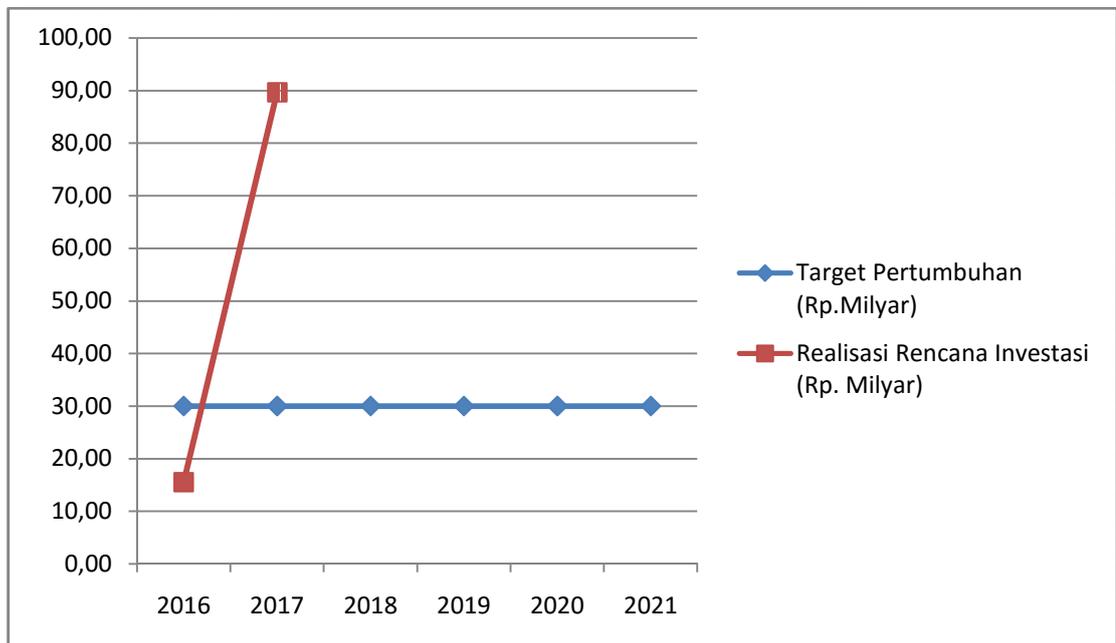
Tabel 3.11
Rencana Investasi Provinsi Jambi Per Kabupaten Tahun 2017

NO	KABUPATEN / KOTA	Jumlah Proyek	Rencana Investasi		Tenaga Kerja	
			PMDN (Rp. Juta)	PMA (US\$. Ribu)	TKI	TKA
1	Batanghari	16	829.893,3	49.966,5	2.056	-
2	Bungo	3	173.943,7	173.943,7	988	-
3	Kerinci	2	600,0	800,0	15	-
4	Kota Jambi	5	461.721,1	-	232	-
5	Merangin	7	50.500,0	398.300,0	525	-
6	Ma. Jambi	23	1.114.638,4	62.624,9	3.598	5
7	Sarolangun	4	14.326.643,0	1.182,2	733	-
8	Tanjung Jabung Barat	5	337.085,0	1.210,0	908	-
9	Tanjung Jabung Timur	8	367.284,5	20.208.000,0	958	5
10	Tebo	3	145.132,0	-	849	-
Total		76	17.807.441,0	20.896.027,3	10.862	10

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 dengan Target Jangka Menengah (periode Renstra 2016-2021)

Jika dibandingkan antar realisasi kinerja indikator Persentase rencana Investasi tahun 2017 dengan target jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi (periode Renstra 2016 – 2021) realisasi kinerja pada tahun 2017 telah melewati target yang ditetapkan bila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2016 dengan kenaikan sebesar 33,5 persen dengan jumlah kenaikan Rp.293,7T. Pada tahun 2016 realisasi rencana investasi sebesar Rp.57,8 T atau diatas target sebesar 33,5%. Perbandingan realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan target Jangka Menengah Periode Renstra (2016-2021) dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.6
Perbandingan antara Ralisasi Rencana Investasi dengan Target jangka Menengah (2016 – 2021)



Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/

Pada sasaran strategis ketiga dengan sasaran meningkatnya daya tarik investasi dan indikator pengukuran capaian kinerja persentase peningkatan

Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

rencana investasi di Provinsi Jambi bisa dikatakan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu termasuk dalam kriteria “sangat Baik” dengan berhasil melewati target yang telah ditetapkan bahkan telah melampaui target jangka menengah periode renstra (2016-2021). Ada beberapa analisis yang dapat disampaikan penyebab dari capaian yang melampaui target tahun 2017 bahkan target periode renstra antara lain :

1. Data Rencana Investasi didapat melalui aplikasi LKPM, data rencana investasi merupakan data yang di tuangkan pada saat perusahaan akan mengajukan izin Prinsip perusahaannya. Data izin prinsip memuat nama perusahaan, alamat perusahaan, lokasi proyek, asal perusahaan, nilai investasi dan jumlah tenaga kerja. Perbandingan realisasi rencana investasi per sector dapat dilihat pada table 3.12 berikut :

Tabel 3.12
Realisasi Rencana Investasi dan Tenaga Kerja per Bidang Usaha Tahun 2017

No	Bidang Usaha	Jumlah Perusahaan		Nilai Investasi		Tenaga Kerja	
		PMA	PMDN	PMA (US\$. Ribu)	PMDN (Rp. Juta)	TKI	TKA
1	Industri Karet, Barang dari karet dan Plastik	1	2	18.200,0	296.143,7	1.218	-
2	Industri Kayu	3	7	73.086,5	142.339,5	1.698	-
3	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi	1	-	3.000,0	-	200	-
4	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik	1	-	5.000,0	-	200	-
5	Industri Makanan	6	11	20.225.551,4	1.385.093,1	1.427	9,0
6	Jasa Lainnya	-	2	-	171.824,1	160	-
7	Jasa Konstruksi	-	3	-	47.374,5	117	-
8	Listrik Gas dan Air	4	2	73.300,0	14.181.800,0	495	-
9	Perdagangan dan Reparasi	2	3	1.702,3	47.182,0	114	1,0
10	Pertambangan	1	-	1.182,2	-	12	-
11	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	-	1	-	350.000,0	10	-

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi

12	Tanaman Pangan dan Perkebunan	4	17	335.751,4	1.093.843,4	5.092	-
13	Transportasi, gudang dan Telekomunikasi	2	3	3.509,8	91.840,7	119	-
Sub Total		25,0	51,0	20.740.283,6	17.807.441,0	10.862	10
Total		76,0		293,7 T *)		10.872	

*) PMA Kurs Rp.13.300

Jika dilihat dari tabel 3.12 diatas Nilai rencana Investasi yang berasal dari PMA pada tahun 2017 merupakan penyumbang nilai investasi yang terbesar yaitu sebesar US\$ 20.740.283.600 dan sektor industri makanan menjadi daya tarik investor pada tahun 2017. Rencana Investasi PMDN realisasi terbesar berasal dari sektor listrik Gas dan Air, pada tahun 2017 direncanakan akan dibangun Pembangkit listrik oleh PT. Indonesian Power berlokasi di Kec. Mandiangin Kabupaten Sarolangun dengan rencana investasi Rp. 14,1 T. Dari data diatas juga dapat di ambil kesimpulan bahwa dari rencana investasi yang akan dijalankan di Provinsi Jambi akan menyerap tenaga kerja sebanyak 10.872 orang.

2. Meningkatnya daya tarik investasi di Provinsi Jambi juga di dukung oleh paket kebijakan pemerintah pusat terutama dengan diterbitkannya Perpres 91 tentang Percepatan Berusaha. Sehingga perusahaan berani untuk berencana menanamkan modalnya di Provinsi Jambi.

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan

Melalui Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi melaksanakan 6 Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian kinerja sasaran tiga ini,

kinerja

yaitu :

1. Kegiatan Temu Usaha dan Promosi Investasi Luar Negeri;
2. Kegiatan Temu Usaha dan Promosi Luar Negeri;
3. Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan promosi investasi;
4. Peningkatan kemitraan strategis untuk pengembangan investasi Provinsi Jambi

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

Kegiatan Temu Usaha dan Promosi Investasi Luar Negeri; Maksud dan tujuan dari pelaksanaan Temu Usaha Dalam Negeri dan Temu Usaha Luar Negeri adalah untuk mempromosikan Peluang investasi yang ada di Provinsi Jambi kepada investor untuk berinvestasi di Jambi. Pada tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi tidak dapat melaksanakan kegiatan Temu Usaha dan Promosi Investasi Luar Negeri.

Kegiatan Temu Usaha dan Promosi Investasi Dalam Negeri Pada tahun 2017 pada kegiatan Temu Usaha dan Promosi Investasi Dalam Negeri Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu mengikuti beberapa pameran dalam negeri dengan tujuan untuk memperkenalkan peluang dan produk investasi yang ada di Provinsi Jambi, pada kegiatan ini juga telah dibuat buku leaflet dan bokleat profil potensi dan peluan investasi Industri Hilir, potensi dan peluang investasi industry hilir dan potensi dan peluang investasi kelapa sawit dan potensi peluang investasi di bidang pariwisata. Adapun beberapa pameran yang diikuti sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Hut Provinsi Jambi ke-71 pada tanggal 6 Januari 2017 di Lapangan Kantor Gubernur Jambi dengan diikuti oleh seluruh OPD

Provinsi dan Kab/Kota dengan menampilkan produk unggulan, potensi investasi, pariwisata, seni budaya dan beberapa pertandingan Olahraga.

2. Inacraft (26-30 April 2017)

Kegiatan ini merupakan sarana untuk mempromosikan produk dan jasa unggulan dari sector investasi, pariwisata, budaya, kerajinan tradisional nusantara, industry kreatif, layanan public edukasi serta produk / jasa unggulan daerah lainnya



3. Pelaksanaan Jakarta Pasion Week 2017 di Jakarta pada tanggal 19-21 Oktober 2017 dengan tema “Batik Negeriku” hal ini dimaksudkan untuk mendorong pengrajin dan meningkatkan daya saing kualitas batik jambi.



4. Kegiatan Nusantara Expo dan Forum 2017 (18 – 22 Oktober 2017) bertempat di Hall A Area Pameran Keong Mas Taman Mini Indonesia Indah Jakarta dengan tema “Kreativitas membangun bangsa yang mandiri dan unggul” dalam rangkaian acara ini dilakukan kegiatan Forum dialog Kaum Muda, Business Matching dan dialog Ekonomi. Kegiatan ini melibatkan 170 Kabupaten/Kota dari 12 Provinsi dan Investor-investor luar negeri yaitu Amerika, Hongaria, Austria, China, Australia dan Turki).





5. Rakornas Pameran Dekranasda dalam rangka HUT Dekranasda ke 37 Tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 26 September – 1 Oktober 2017 bertempat di JCC Jakarta.
6. Kegiatan RIF (Regional Investment Forum) tanggal 15 – 17 Oktober 2017 yang digelar oleh BKPM, didukung oleh Kementerian pariwisata, Bank Indonesia dan Pemda Sumatera Barat dengan tema “showcasing investment opportunities in the Indonesia Tourist Industry dengan rangkaian Kegiatan Forum on one meeting dan Business matching”
7. Pelaksanaan Pameran investrade Expo 2017 dilaksanakan pada tanggal 10 – 13 November 2017 bertempat di Mega Mall Batam Center Kota Batam yang dihadiri oleh Kementrian dan Lembaga, pimpinan BUMN dan Lembaga Non pemerintah.



Kegiatan Peningkatan Kegiatan Kemitraan penting untuk dilaksanakan sebagai perwujudan tanggung jawab bersama dalam rangka mengurangi angka pengangguran, mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah menuju peningkatan daya saing nasional, dengan memfasilitasi jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah/besar (Perusahaan Mitra) disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha besar, sehingga saling memerlukan, menguntungkan, dan memperkuat.

Kemitraan adalah kegiatan memfasilitasi pertemuan antara pengusaha sektor mikro, kecil, menengah, dan koperasi beserta pengusaha besar dan dinas/instansi teknis terkait dalam rangka peningkatan pengembangan investasi di Provinsi

Jambi.



4. SASARAN STRATEGIS EMPAT

SASARAN STRATEGIS 4

“Tersusunnya perencanaan investasi yang interaktif, kolaboratif, implementatif, harmonis dan berwawasan lingkungan dalam rangka peningkatan daya saing”

Dalam rangka menyusun perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal yang menopang pembangunan ekonomi Provinsi Jambi dengan sub kerangka kerja berupa pemetaan potensi investasi, fasilitasi pengembangan jaringan kerjasama dan kemitraan antar seluruh sektor dan level perekonomian, serta koordinasi intensif antara institusi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bidang perencanaan dan pengembangan iklim investasi dan lintas sektoral dalam rangka perumusan Rancangan Umum Penanaman Modal tahun 2015-2025.

Kegiatan perencanaan Investasi Provinsi Jambi adalah kegiatan pendahuluan yang dilakukan dalam rangka memperoleh data potensi investasi lokal yang akan dipromosikan kepada investor baik PMA maupun PMDN untuk digarap. Selanjutnya dilakukan serah-terima penyusunan dokumen peta potensi kepada institusi yang memiliki akuntabilitas untuk mencegah atau mengurangi terjadinya penyimpangan dan atau ketidakakuratan metodologis penyusunan

dokumen.

Guna mewujudkan misi ke empat dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi yaitu Tersusunnya perencanaan investasi yang interaktif, kolaboratif, kolaboratif, implementatif, harmonis dan berwawasan lingkungan dalam rangka peningkatan daya saing maka perlu dilakukan pengukuran terhadap sasaran strategis yang diemban berdasarkan indikator yang telah ditetapkan didalam renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi yaitu Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Provinsi jambi. Adapun capaian kinerja sasaran strategis tiga dan pengukuran indikator sasaran strategis 4 sebagai berikut :

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4

Indikator Kinerja	Capaian Realisasi Th. 2016	Target	Realisasi	%
Pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal di Provinsi Jambi	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Total capaian sasaran strategis 4				100

Adapun analisis capaian kinerja pada sasaran strategis 4 diuraikan sebagai berikut :

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2017

Pada Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk sasaran strategis satu ***“Tersusunnya perencanaan investasi yang interaktif, kolaboratif, implementatif, harmonis dan berwawasan lingkungan dalam rangka peningkatan daya saing”*** yang menjadi indikator kinerja utamanya adalah pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal di Provinsi Jambi..

Pada tahun 2017 realisasi pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal di Provinsi Jambi terrealisasi 1 Dokumen

pemetaan adapun pemetaan yang dilakukan terhadap potensi-potensi yang dapat dikembangkan dalam proyek-proyek pengembangan investasi selanjutnya. Ada 5 Kabupaten Kota yang dipetakan pada tahun 2017 yaitu : Kota Jambi, Muaro Jambi, Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jika dibandingkan dengan target tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah berhasil mencapai target dengan menyelesaikan dokumen pemetaan rencana investasi untuk 5 Kabupaten Kota diatas.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 dengan Target Jangka Menengah (periode Renstra 2016-2021)

Jika dibandingkan antar realisasi kinerja indikator Pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal di Provinsi Jambi tahun 2017 dengan target jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi (periode Renstra 2016 – 2021) realisasi kinerja pada tahun 2017 meningkat bila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2016 dengan berhasil membuat perencanaan pengembangan penanaman modal di Provinsi Jambi . Perbandingan realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan target Jangka Menengah Periode Renstra (2016-2021) dilihat pada Tabel 3.14 berikut :

Tabel. 3.14
Perbandingan Capaian Realisasi dengan Target Periode Renstra (2016 s/d 2021)

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Target	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
2	Realisasi	-	1 Dokumen	-	-	-	-

Capaian Realisasi	-	100	-	-	-	-
-------------------	---	-----	---	---	---	---

<p><i>Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan</i></p>	<p>Pada tahun 2016 belum ada anggaran untuk pemetaan perencanaan pengembangan penanaman modal di Provinsi Jambi sehingga realisasi untuk tahun 2016 adalah 0. Pada Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk sasaran 4 telah berhasil membuat pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal di Provinsi Jambi dengan memetakan potensi-potensi yang dapat dikembangkan dalam proyek pengembangan investasi selanjutnya di 5 kabupaten/Kota yaitu Kota Jambi, Muaro Jambi, Batanghari, Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.</p>
<p><i>Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja</i></p>	<p>Melalui Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi melaksanakan 4 Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian kinerja sasaran empat ini, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan pemetaan potensi investasi Provinsi Jambi; 2. Harmonisasi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal; dan 3. Pengembangan Potensi Investasi Provinsi Jambi. <p>Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :</p>
<p><i>Penyusunan pemetaan potensi investasi Provinsi Jambi;</i></p>	<p>Penyusunan pemetaan potensi investasi bertujuan untuk mengidentifikasi lapangan usaha dan komoditas strategis yang menjasi potensi daerah sehingga mampu untuk dikembangkan, memberikan</p>

informasi yang akurat mengenai lapangan usaha, komoditi dan potensi yang ada di Provinsi Jambi kepada pemilik modal (investor), menyajikan factor pendukung/penunjang dan kendala investasi daerah, pembuatan rekomendasi investasi-investasi daerah, pembuatan program dan kegiatan pengembangan investasi daerah. Tahapan yang dilakukan dalam kegiatan penyusunan pemetaan potensi investasi Provinsi Jambi yaitu :

a. Tahapan persiapan.

Melakukan pengumpulan data primer melalui pendataan langsung dilapangan baik observasi maupun wawancara dan pengumpulan data sekunder.

b. Tahap analisa data

Menganalisis data-data primer maupun sekunder yang terkumpul dan terseleksi dan selanjutnya digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Kegiatan pembuatan dokumen pembuatan peta potensi investasi Provinsi Jambi Tahun 2017

c. Tahap Pelaporan

Hasil analisis yang telah dilakukan selanjutnya dituangkan dalam bentuk laporan terstruktur yang secara substansial memuat hasil-hasil identifikasi, analisis dan perumusan serta rekomendasi pengembangan potensi investasi di 5 Kab/kota.

Harmonisasi Kegiatan yang dilaksanakan berupa
Perencanaan dan penyelenggaraan FGD RUPM yang merupakan
Pengembangan Iklim bagian dari kegiatan harmonisasi perencanaan dan
Penanaman Modal Pengembangan Penanaman Modal tahun 2017.
 Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2012 menegaskan bahwa RUPM menjadi acuan bagi

Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal. Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten/Kota.

Adapun tujuan dari kegiatan harmonisasi perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal adalah :

- Terciptanya koordinasi dan konsolidasi instansi dan stake holders untuk saling tukar menukar informasi, pemikiran, serta usulan untuk membahas berbagai permasalahan yang terkait dengan penanaman modal daerah
- Adanya alternatif solusi dengan program dan tindakan yang konstruktif dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan iklim investasi penanaman modal yang kondusif di Provinsi Jambi.
- Penyelesaian draft RUPM Provinsi



Kegiatan Pengembangan Potensi Investasi Pengembangan Potensi Investasi Provinsi Jambi dilaksanakan dalam bentuk *Pra-Feasibility Study* Komoditas Utama Provinsi Jambi Tahun 2017, yaitu Kopi, Karet, dan Coklat. *Pra-Feasibility Study* secara deskriptif adalah kajian kelayakan terhadap potensi komoditas perkebunan kopi, karet, dan coklat yang menjadi komoditas utama unggulan Provinsi Jambi. Kajian ini menyajikan gambaran bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana pengembangan potensi investasi dalam sektor perkebunan terkhusus bagi komoditas kopi, karet, dan coklat. Sekaligus memberikan informasi dan masukan kepada pihak (calon) investor dan masyarakat terhadap kelayakan pengembangan potensi perkebunan komoditas utama sebagaimana tersebut di atas.

Tujuan *Pra-Feasibility Study* Komoditas Utama Provinsi Jambi Kopi, Karet, dan Coklat adalah sebagai berikut;

- Melakukan kajian terhadap kelayakan lokasi berdasarkan kebijakan tata ruang yang ada serta aksesibilitas
- Melakukan kajian kelayakan berdasarkan aspek SDM
- Melakukan kajian kelayakan berdasarkan aspek pemasaran
- Melakukan kajian kelayakan berdasarkan aspek keuangan/financial
- Melakukan kajian kelayakan berdasarkan aspek kelembagaan.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Pagu anggaran belanja tidak langsung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi yang bersumber dari dana APBD murni Provinsi Jambi Tahun 2017 berjumlah sebesar Rp.4.740.232.706,-. Sampai dengan 31 Desember 2017, terjadi perubahan menjadi Rp.6.211.800.860 dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp.5.936.420.811 atau 95,57%.
2. Pagu anggaran belanja langsung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi Tahun 2017 berjumlah sebesar Rp.6.581.681.306,-. Sampai dengan 31 Desember 2017, realisasi serapan anggaran sebesar Rp.5.812.132.151,- atau 88,31%. Jika dibandingkan dengan pagu anggaran belanja Tahun 2016 sebesar Rp.6.180.651.000,- maka pada Tahun 2017 terjadi peningkatan pagu anggaran sebesar Rp.401.030.306,- atau sekitar 6,48%.

Tabel 3.15
Realisasi Anggaran per 31 Desember 2017

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Capaian
Belanja	11.321.914.011,60	11.079.800.253	97.86
Belanja Tidak Langsung	4.740.232.706,00	5.342.148.030	112.69
- Belanja Pegawai			
Belanja Langsung	6.581.681.305,60	5.812.132.151	88.31
- Belanja Pegawai	761.170.500	668.752.709	87.86
- Belanja Barang dan Jasa	5.216.918.305,60	4.553.060.442	87.16
- Belanja Modal	603.592.500,00	590.319.000	97.80

Anggaran belanja langsung sebagaimana tersebut diatas dialokasikan ke masing-masing bidang, sekretariat dan lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretariat, sebesar Rp. 2.996.399.905,60,-
2. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, sebesar Rp. 874.075.000,- (3 kegiatan)
3. Bidang Promosi Penanaman Modal, sebesar Rp. 1.277.160.000,- (3 kegiatan)
4. Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal, sebesar Rp. 559.451.400,- (2 kegiatan)
5. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A, sebesar Rp. 250.000.000,- (1 kegiatan)
6. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B, sebesar Rp. 378.095.000,- (1 kegiatan)
7. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, sebesar Rp. 246.500.000,- (2 kegiatan)

Secara rinci, realisasi sarapan dari masing-masing pagu anggaran tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16 Realisasi Anggaran DPMPTSP Provinsi Jambi Tahun 2017 Menurut Sekretariat dan Bidang

No	Bidang & Sekretariat	Realisasi s/d 31 Desember 2017				
		Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
1	Sekretariat	3.056.399.905,6	2.879.885.327,0	94,22	176.514.574,6	5,78
2	Bidang PKPM	874.075.000,0	851.885.849,0	97,46	22.189.151,0	2,54
3	Bidang Promosi	1.277.160.000,0	816.011.825,0	63,89	461.148.175,0	36,11
4	Bidang Pembinaan	499.451.400,0	421.380.500,0	84,37	78.070.900,0	15,63
5	Bidang PTSP A	250.000.000,0	246.706.250,0	98,68	3.293.750,0	1,32
6	Bidang PTSP B	378.095.000,0	349.945.100,0	92,55	28.149.900,0	7,45
7	Bidang Pengaduan	246.500.000,0	246.317.300,0	99,93	182.700,0	0,07

Total	6.581.681.305,6	5.812.132.151,0	88,31	769.549.154,6	11,69
--------------	------------------------	------------------------	--------------	----------------------	--------------

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi Tahun 2017 sebesar 88.31%. Penyerapan anggaran ini berbanding lurus dengan pelaksanaan kinerja yang secara menyeluruh telah dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan hal ini, maka terdapat sisa anggaran sebesar 11.69%. Sisa anggaran ini didalamnya terkandung muatan kebijakan penghematan anggaran namun demikian penghematan tersebut tetap memperhatikan mutu dari capaian kinerja.
2. Realisasi penyerapan anggaran bidang menunjukkan bahwa penyerapan anggaran tertinggi diraih oleh Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan sebesar 99,93%, sedangkan yang terendah adalah Bidang Promosi Penanaman Modal sebesar 63.89%.

Alokasi anggaran berdasarkan per program pada Tahun Anggaran 2017 dibagi atas 7 program, dimana pagu anggaran tertinggi yaitu Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi sebesar Rp. 2.151.235.000,- dan yang terendah yaitu Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp. 38.880.000-. Untuk lebih jelasnya realisasi anggaran per-program dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.17 Realisasi Anggaran DPMPTSP Provinsi Jambi Tahun 2017 Per-Program

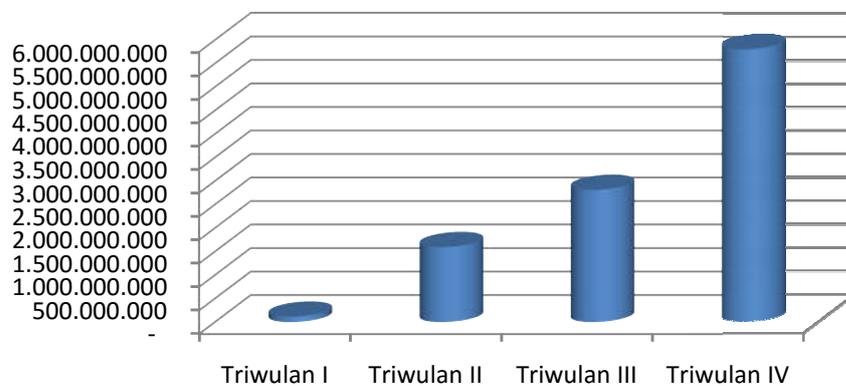
No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	% capaian
1	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.563.557.406	1.434.272.317	91,73
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.071.112.500	1.049.724.000	98,00
3	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	38.880.000	38.880.000	100,00
4	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	123.805.500	106.311.200	85,87
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	259.044.500	250.697.810	96,78

6	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	2.151.235.000	1.667.897.674	77,53
7	Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi	1.374.046.400	1.264.349.150	92,02
Total		6.581.681.306	5.812.132.151	88,31

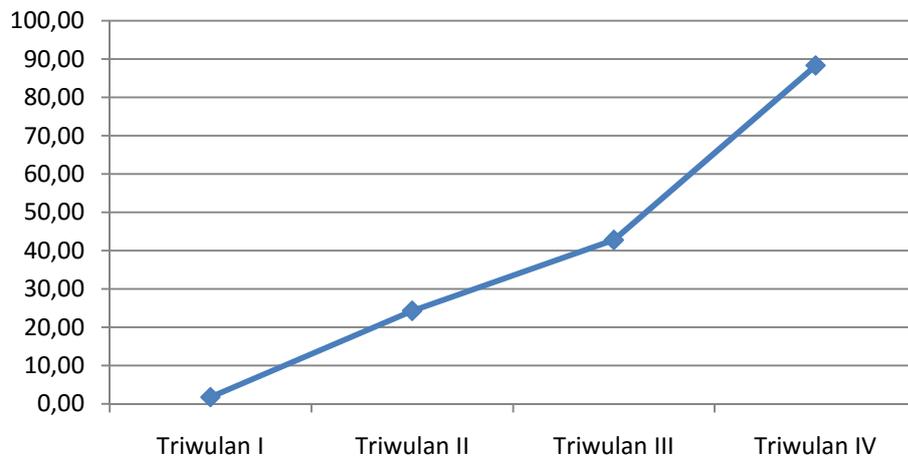
Realisasi Anggaran per-Triwulan Tahun 2017

Realisasi anggaran per-triwulan pada Tahun 2017 dapat dijelaskan sebagaimana grafik dibawah ini:

Grafik 3.7 Realisasi Anggaran per-Triwulan



Pola penyerapan anggaran Tahun 2017 terlihat pada grafik perkembangan penyerapan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi per-Triwulan sebagaimana grafik 3.6 berikut ini:

Grafik 3.8 Persentase per-Triwulan

Faktor penyebab tidak terserapnya anggaran 100%

Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya serapan anggaran sebesar 100% antara lain sebagai berikut:

1. Dikarenakan adanya efisiensi dana dalam pelaksanaan kegiatan dan rasionalisasi anggaran yang dilakukan.
2. Pergantian Pengguna Anggaran yang cukup mengganggu dalam pengajuan pejabat pengelola keuangan OPD maupun dalam administrasi keuangan.

BAB 4

Penutup

A. Kesimpulan

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi merupakan instansi Pemerintah Daerah yang diberikan tugas, bertanggung jawab dan amanah untuk melaksanakan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi 2016-2021, Renjana Kerja dan Penetapan/Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi 2017.
2. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017. Berbagai capaian sasaran strategis tersebut tercermin dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
3. Hasil capaian kinerja yang telah ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

B. Saran

1. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual

dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target kinerja yang sudah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
3. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota akan dilakukan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan instansi di Provinsi maupun di Kabupaten/ Kota dan dunia usaha.
4. Agar implementasi sistem AKIP benar-benar efektif, perlu segera direalisasikan sinergisitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan *out put* maupun *out come* kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergisitas tersebut, kinerja organisasi yang dibiayai melalui dana APBD benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.
5. Menjadikan SAKIP ukuran kinerja organisasi secara nyata dan akuntabel, dengan menerapkan fungsi *reward* and *punishment* yang tegas dan ketat

LAMPIRAN

Lampiran 3 : Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2017

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Meningkat kualitas pelayanan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing	- Lama hari pengurusan perizinan
	- Presentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan.
	- Indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal
Meningkatnya realisasi investasi	- Pertumbuhan realisasi investasi
	- Nilai realisasi Investasi : PMDN PMA
Meningkatnya daya tarik investasi di Provinsi Jambi	- Presentase peningkatan rencana investasi di Provinsi Jambi
Tersusunnya perencanaan investasi yang integratif, kolaboratif, implementatif, harmonis dan berwawasan lingkungan dalam rangka peningkatan daya saing	- Pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal di Provinsi Jambi

Target
10 Hari
10%
A
10%
4283,69 (Rp. Triliun) 130,35 (US\$. Juta)
30%
1 Dokumen

Lampiran 4: Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun 2017
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kriteria
Meningkat kualitas pelayanan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing	- Lama hari pengurusan perizinan	10 Hari	10 Hari	100,00	Sangat Baik
	- Presentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan.	10%	6,99%	69,90	Kurang Baik
	- Indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal	A	A	100,00	Sangat Baik
Meningkatnya realisasi investasi	- Pertumbuhan realisasi investasi	10%	12,02%	120,17	Sangat Baik
	- Nilai realisasi Investasi : PMDN PMA	4283,69 (Rp. T) 130,35 (US\$. Juta)	4,2608	99,46	Baik
			4,2608(Rp. T)	99,46	Kurang Baik
			76,83 (US\$. Juta)	58,94	Sangat Baik
Meningkatnya daya tarik investasi di Provinsi Jambi	- Presentase peningkatan rencana investasi di Provinsi Jambi	30%	89,62%	298,72	Sangat Baik
Tersusunnya perencanaan investasi yang integratif, kolaboratif, implementatif, harmonis dan berwawasan lingkungan dalam rangka peningkatan daya saing	- Pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal di Provinsi Jambi	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	Sangat Baik

Lampiran 5 : Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2017
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Program	Pagu Anggaran	Realisasi
1	Meningkat kualitas pelayanan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing	- Lama hari pengurusan perizinan	10 Hari	10 Hari	100,00	Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi	1.374.046.400	1.264.349.150
		- Presentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan.	10%	6,99%	69,90			
		- Indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal	A	A	100,00			
2	Meningkatnya realisasi investasi	- Pertumbuhan realisasi investasi	10%	12,02%	120,17	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	2.151.235.000	1.667.897.674
		- Nilai realisasi Investasi :						
		PMDN PMA	4283,69 (Rp. T) 130,35 (US\$. Juta)	4,2608 76,83 (US\$. Juta)	99,46 99,46 58,94			
3	Meningkatnya daya tarik investasi di Provinsi Jambi	- Presentase peningkatan rencana investasi di Provinsi Jambi	30%	89,62%	298,72	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	2.151.235.000	1.667.897.674
4	Tersusunnya perencanaan investasi yang integratif, kolaboratif, implementatif, harmonis dan berwawasan lingkungan dalam rangka peningkatan daya saing	- Pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal di Provinsi Jambi	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00			

%

92,02

77,53